

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA
KUMUH) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN SANUA
KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA KENDARI**

SKRIPSI

OLEH :

Arit Indrajab

45 13 142 077



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memeberikan rahmat, Nikmat dan hidayah-Nyalah kepada saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari”**. Tugas Akhir ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana STRATA SATU (S-1) pada Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar dan merupakan salah satu proses akhir dari kegiatan pembelajaran di Universitas pada umumnya dan Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Pada khususnya.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT Maha Pemberi segalanya atas rahmat, karunia dan kemudahan yang diberikan kepada penyusun.
2. Ibu Dr. Hamsina ST, M. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa;

3. Bapak Jufriadi, ST, M.Sp selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa;
4. Seluruh staf tata usaha Fakultas Teknik dan tata usaha Program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Terutama Kak Rosmini jurusan dan Ibu Rosmile fakultas, terima kasih atas pelayanan dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa;
5. Bapak Dr. Ir. Syafri, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ilham Yahya, ST. MSP selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini;
6. Sembah sujud kepada orang tua tercinta Ayah Naim dan ibu Hasmin yang telah memberikan kasih sayang, doa, asuhan, dukungan, dan bimbingan baik dalam bentuk materil dan moril;
7. Secara khusus dan tulus penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kakak dan adik saya Akri Puspito, Leli Inraweli, Fera dan keluarga untuk setiap detik yang dilalui dengan penuh cinta dan telah membantu berupa moril maupun dalam hal finansial. Terima kasih atas segalanya.
8. Sahabat-sahabat Nur Sella, Syamsumarlin Bahtiar, Jalaludin Basri, Malita Tri Bayanti, Muh.Sahid Assagaf, Sri Auliya Rahman, Daswar

Pratama, Ahmad Sahrul, Ebeng Lisaholik dan Saudara seperjuanganku Planologi 2013, Senior Dan Junior Planologi, IPPMIK, Hipma Butur, HMPWK, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Terima kasih atas bantuan, dukungan, dan kerjasamanya selama ini;

9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala semua pihak yang telah memabantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Makassar, Januari 2018

Arit Indrajab

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BEBASIS MASYARAKAT DIKELURAHAN SANUA KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA KENDARI

Oleh
ARIT INDRAJAB

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program penanganan pemukiman kumuh menjadi pemukiman yang layak huni di perkotaan, melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang memberi penanganan masyarakat yang lebih besar.

Penelitian ini menggunakan rumusan masalah yakni bagaimana implementasi program KOTAKU di Kelurahan Sanua dan bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat terhadap pelaksanaan program KOTAKU.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kepala Kelurahan Sanua dan Masyarakat Kelurahan Sanua. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interactive model analysis dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi program KOTAKU telah melalui empat tahap utama yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi. Dari tiap – tiap hasil pelaksanaan program KOTAKU tidak seluruh masyarakat ikut terlibat di

dalamnya, masih terlalu dominan peran pemerintah dalam segala bentuk yang membuat tidak maksimalnya realisasi pembangunan berbasis masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Program KOTAKU dan Pembangunan Berbasis Masyarakat



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR PETA	v
DAFTAR GAMBAR	v
ABSTRAK	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Pembahasan	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Permukiman	11
1. Pengertian Permukiman	11
2. Persyaratan Permukiman	15
3. Kualitas Lingkungan Permukiman	17
B. Kumuh	22
1. Pengertian Kumuh	22
2. Kawasan Kumuh	23
C. Permukiman Kumuh	24
1. Pengertian Permukiman Kumuh	24
2. Kriteria Permukiman Kumuh	26
D. Program KOTAKU Dalam Menangani Kekumuhan	28
1. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	28

2. Tujuan Program KOTAKU.....	30
3. Strategi Pelaksanaan Program KOTAKU	32
E. Konsep Partisipasi Masyarakat.....	34
1. Filosofi Ilmu Perencanaan Pembangunan Kota Berbasis Masyarakat	34
2. Sosialisasi.....	35
3. Urgensi Partisipasi Masyarakat.....	36
4. Strategi Pembangunan Infrastruktur Berbasis masyarakat....	37
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat....	39
6. Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.....	41
F. Penelitian Terdahulu	42
G. Kerangka Pikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	45
B. Waktu Penelitian	45
C. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	47
1. Jenis Penelitian	47
2. Sifat Penelitian	47
D. Populasi Dan Sampel Penelitian	48
1. Populasi Penelitian.....	48
2. Sampel Penelitian	48
E. Jenis Dan sumber Data.....	51
1. Jenis Data	51
2. Sumber data.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Variabel Penelitian	53
H. Metode Analisis Data	54

1. Reduksi Data.....	55
2. Penyajian Data.....	56
3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi	56
I. Definisi Operasional Penelitian.....	57
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kota Kendari	59
1. Letak Geografis dan Administrasi.....	59
2. Topografi.....	62
3. Iklim dan Musim	62
4. Suhu Udara.....	63
5. Geologi	64
B. Gambaran Umum Kecamatan Kendari Barat	67
1. Letak Geografis dan Administrasi.....	67
2. Kalimatologi	70
3. Geologi	71
C. Gambaran Umum Kelurahan Sanua	72
1. Letak Geografis dan Administrasi.....	72
2. Data Kependudukan	72
3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya	74
4. Kondisi Fisik Dasar	76
a. Kondisi Penggunaan Lahan	77
b. Kondisi Fisik Bangunan.....	78
c. Kondisi Jaringan Jalan	79
d. Kondisi Jaringan Drainase	81
e. Kondisi Persampahan	83
f. Kondisi Air Minum	85

D. Narasumber Penelitian.....	87
1. Identitas Narasumber	87
E. Temuan Penelitian	89
1. Tahap Persiapan.....	89
2. Tahap Perencanaan	92
3. Tahap Pelaksanaan	96
4. Tahap Evaluasi	100
F. Analisis Dan Pembahasan Hasil Penelitian	102
1. Tahap Persiapan.....	103
2. Tahap Perencanaan.....	104
3. Tahap Pelaksanaan	106
4. Tahap Evaluasi	108
G. Implementasi Program Kotaku Dalam Pembangunan Infrastruktur.....	110
1. Kriteria Dan Indikator Permasalahan Permukiman Kumuh	110
2. Rencana Jalan Lingkungan.....	115
3. Rencana Drainase Lingkungan.....	116
4. Rencana Penyediaan Air Minum.....	117
5. Rencana Pengelolaan Limba	119
6. Rencana Pengelolaan Sampah	121
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jarak Maksimal Sarana dari Permukiman	19
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Skripsi Tahun 2017	46
Tabel 4.1 Luas wilayah Kota Kendari Berdasarkan Administrasi Kecamatan Tahun 2016	61
Tabel 4.2 Luas Wilayah Kecamatan Kendari Barat Menurut Kelurahan Tahun 2016.....	69
Tabel 4.3 kondisi Penduduk menurut Kategori di Kelurahan Sanua Tahun 2017...	75
Tabel 4.4 Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Sanua Tahun 2017	76
Tabel 4.5 Kondisi Sosial Di Kelurahan Sanua Tahun 2017	76
Tabel 4.6 Suku dan Budaya Di Kelurahan Sanua Tahun 2017	77
Tabel 4.7 Penggunaan Lahan Di Kelurahan Sanua Tahun 2017	78
Tabel 4.8 Kondisi Fisik Bangunan Di Kelurahan Sanua Tahun 2017	79
Tabel 4.9 Kondisi Jaringan Jalan Di Kelurahan Sanua Tahun 2017	80
Tabel 4.10 Kondisi Jaringan Drainase di Kelurahan Sanua Tahun 2017	82
Tabel 4.11 Tempat Persampahan Di Kelurahan Sanua Tahun 2017	84

DAFTAR PETA

1. Peta Administrasi Kota Kendari.....	IV-62
2. Peta Administrasi Kecamatan Kendari Barat.....	IV-71
3. Peta Administrasi Kelurahan Sanua.....	IV-74
4. Peta Jaringan Jalan Kelurahan Sanua.....	IV-81
5. Peta Jaringan Drainase Kelurahan Sanua.....	IV-82
6. Peta Kondisi Persampahan Kelurahan Sanua.....	IV-84
7. Peta Kondisi Air Minum Kelurahan Sanua.....	IV-86
8. Peta Gambaran Umum Lokasi Penelitian	III-47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif III-58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota umumnya berawal dari suatu permukiman kecil yang secara spasial mempunyai lokasi strategis bagi kegiatan perdagangan. Pengembangan kota merupakan suatu proses perubahan suatu kota dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda yang dapat dirinci dari penduduk yang makin bertambah dan makin padat, pembangunan-pembangunannya yang semakin rapat dan wilayah terbangun terutama permukiman yang cenderung semakin luas, semakin lengkapnya fasilitas kota yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi kota.

Peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan yang berlebihan akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana permukiman. Kondisi ini terutama terjadi karena adanya penambahan aktivitas kota dalam kegiatan ekonomi-sosial dan pergerakan arus transportasi. Tingkat kepadatan penduduk terjadi semakin tinggi, berjalan dengan seiring kebutuhan akan rumah tinggal. Hal yang sering terjadi adalah tingkat kebutuhan rumah tinggal yang tidak seimbang dengan tingkat kemampuan kota dalam penyediaan prasarana dan sarana permukiman yang terjangkau dan

layak huni karena keterbatasan lahan kota. Akibatnya adalah suatu kawasan permukiman akan menerima beban yang melebihi kemampuan daya dukung lingkungan dan cenderung menjadi kumuh.

Lingkungan permukiman kumuh di perkotaan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, Perkembangan lingkungan permukiman kumuh di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan baik karena faktor pertumbuhan penduduk itu sendiri maupun faktor Urbanisasi. Dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini lebih disebabkan oleh tidak seimbangnya peluang untuk mencari nafkah di daerah pedesaan dan perkotaan, sehingga memunculkan adanya daya tarik kota yang dianggap mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan atau luar kota, sementara latar belakang kapasitas dan kemampuan para pendatang sangat marjinal. Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, maka kebutuhan penyediaan akan sarana dan prasarana permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru. Selanjutnya pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung sarana dan prasarana lingkungan

permukiman yang ada mulai menurun yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi terhadap terciptanya lingkungan permukiman kumuh. Kekumuhan lingkungan permukiman cenderung bersifat paradoks, bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan permukiman tersebut, kekumuhan adalah kenyataan sehari-hari yang tidak mereka masalahkan, sedangkan di pihak lain yang berkeinginan untuk menanganinya, masalah kumuh adalah suatu permasalahan yang perlu segera ditangani

Permukiman kumuh selalu menjadi masalah yang terdapat pada kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Kota Kendari. Permukiman kumuh ini umumnya dihuni oleh para penghuni desa atau dari kota yang lebih kecil yang sengaja berpindah/datang menetap dikota yang lebih besar untuk ikut bersama-sama di dalam kegiatan ekonomi kota dan biasanya merupakan dampak dari suatu perkembangan perekonomian yang begitu pesat dari suatu kota.

Pertumbuhan pembangunan di kota Kendari seperti di perkotaan lain di Indonesia, sangat berpengaruh oleh pertumbuhan populasi manusia akibat urbanisasi, terutama pada pendatang yang akhirnya menetap. Pertumbuhan disemua sektor pembangunan lingkungan perkotaan adalah akibat gelombang urbanisasi yang dipicu oleh pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kota yang

merupakan daya tarik sekaligus daya dorong bagi para warga yang ingin memperoleh peluang kehidupan yang lebih baik. Laju pembangunan itu pula yang menyebabkan perkembangan kota seolah tanpa arah.

Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Oleh karena itu, DJCK menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program KOTAKU.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang

mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu daerah yang termaksud dalam kawasan kumuh adalah Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Kelurahan sanua merupakan bagian wilayah administrasi dari Kecamatan Kendari Barat yang merupakan salah satu kampung tua yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kondisi lingkungan Kelurahan Sanua yang terdiri dari 6 RW dan 17 RT memiliki luas 163 hektar dimana 46% digunakan sebagai lahan permukiman dan hanya seluas 4 hektar, 26% lahan pekarangan seluas 28,50 hektar, 1% lahan kuburan seluas 1,50%, 4% yang digunakan sebagai lahan produktif yang terdiri dari 1% lahan perkantoran dan 3% lahan untuk pertanian dan perikanan.

Kelurahan Sanua pada tahun 2007 sebelum program-program pengentasan kumuh di implementasikan, wilayah ini dikatakan kumuh karena pembangunan yang tidak rapih, pembanguna rumah yang ada

pada Kelurahan tersebut tidak terstruktur, sarana dan prasarana masih dikatakan tidak lengkap, tidak layak huni, dan sudah tidak dapat dimanfaatkan. Drainase yang keadaannya sudah rusak, jalan paving blok yang mengalami kekurangan, kurang luas dan panjangnya jalan aspal yang tersedia pada beberapa titik ruas jalan, tidak adanya ketersediaan penampungan air bersih dan mck umum.

Infrastruktur jalan di kelurahan Sanua meliputi 1.300 meter jalan aspal, 180 meter rabat beton, 700 meter paving block, dan 100 meter jalan tanah. Jalan-jalan yang ada pada Kelurahan Sanua mengalami kerusakan diakibatkan oleh telah rusaknya infrastuktur di beberapa titik ruas jalan yang telah lama dibangun.

Munculnya program KOTAKU di Kecamatan Sanua Kecamatan Kendari Barat pada tahun 2016 menjadi pendukung dalam terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Yang dipimpin oleh pemerintah dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam perencanaan mampu implementasi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam menjalankan program tersebut, sebagai program yang mampu menanggulangi kemiskinan dan permukiman kumuh di perkotaan.

Kenyataan tersebut di atas, melandasi perlu adanya penelitian tentang implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) melalui pembanguna infrastruktur berbasis masyarakat di Kelurahan sanua

Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sebagai bagian dalam meningkatkan kualitas permukiman perkotaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan peninjaun awal terhadap kondisi eksisting pada lokasi penelitian, maka dapat dirumuskan masalah berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program KOTAKU dikelurahan Sunua?
2. Bagaimana bentuk Keterlibatan Masyarakat Terhadap pelaksanaan program KOTAKU?

C. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji Implementasi Program KOTAKU (kota tanpa kumuh) Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat.
2. Untuk menganalisis keterlibatan masyarakat terhadap program KOTAKU.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota khususnya mengenai implementasi dan pembangunan infrastruktur.

2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah daerah yang bertugas menjalankan program KOTAKU.
3. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang perencanaan wilayah dan kota Sebagai disiplin ilmu, khususnya mengenai pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah di fokuskan pada wilayah lokasi Penelitian Permukiman Kumuh Kota Kendari Kecamatan Kendari Selatan Kelurahan Sunua.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini dibatasi pada pembahasan terkait implementasi program KOTAKU terhadap keterlibatan masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Sunua.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam laporan ini sebagai berikut :

BAB I : Pada bagian ini membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka, teori yang terkait dengan variable dalam penelitian ini.

BAB III : Memuat tentang proses pelaksanaan kegiatan, metode analisis, dan pendekatan dalam melakukan analisis kawasan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. struktur organisasi dan teknik pelaksanaan penyusunan laporan, yang terdiri dari; rencana pelaksanaan kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan dan seterusnya.

BAB IV : Pada bab ini Memuat tentang data-data variabel hasil survey, keadaan di lokasi penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian yang di dapat pada lokasi penelitian.

BAB V : Pada bagian ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian permasalahan yang telah dikemukakan terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai studi kasus yang di ambil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Permukiman

1. Pengertian Permukiman

Secara formal, definisi permukiman di Indonesia tertulis dalam UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam dokumen tersebut, permukiman didefinisikan sebagai lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain. Area permukiman dapat terletak di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.

Pada tataran teoritis, Doxiadis (1968) mengatakan bahwa permukiman adalah hasil interaksi antara manusia dan lingkungannya yang bersifat dinamis. Permukiman selalu berkembang dari waktu-waktu, baik secara natural maupun dengan intervensi dari luar.

Doxiadis (1968) lebih jauh menggambarkan permukiman dalam lima elemen pembentuknya, yaitu nature, man, society, shells, dan network. Nature merupakan lingkungan alamiah yang menjadi wadah untuk manusia (man) beraktivitas. Manusia sebagai makhluk sosial pada akhirnya akan membentuk kelompok-

kelompok sosial dalam rangka bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya. Kelompok-kelompok ini kemudian mengembangkan norma dan relasi internal dan dikenali sebagai masyarakat (society) tertentu. Dari perkembangan fisik lingkungan, lingkungan alamiah tidaklah cukup untuk menyediakan perlindungan terhadap aktivitas manusia. Masyarakat kemudian mengubah sebagian lingkungan alamiah untuk menjadi hunian (shell). Perkembangan shell yang semakin kompleks kemudian harus dilengkapi dengan elemen penunjang aktivitas yang menghubungkan hunian-hunian dalam satu sistem lingkungan. Jaringan penghubung antar shell ini kemudian dikenal dengan network. Jaringan ini merupakan prasarana, utilitas umum yang juga disebutkan dalam definisi permukiman menurut UU No 1 tahun 2011.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU No. 4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman).

Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan

kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permukiman ini dapat berupa permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan (Kamus Tata Ruang Tahun 1997).

Permukiman adalah tempat atau daerah untuk bertempat tinggal dan menetap (Kamus Tata Ruang 1997) Permukiman di dalam kamus tata ruang terdiri dari tiga pengertian yaitu :

1. Bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
2. Kawasan yang didomisili oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.
3. Tempat atau daerah untuk bertempat tinggal atau tempat untuk menetap. Permukiman adalah suatu lingkungan hidup yang

meliputi masalah lapangan kerja, struktur perekonomian dan masalah kependudukan yang bukan saja mencakup mengenai pemerataan dan penyebaran penduduk melainkan juga menyangkut kualitas manusia yang diharapkan pada generasi mendatang (Hardriyanto. D, 1986: 17 dalam Laode Masrun diakses tanggal 16/02/2011).

Menurut Doxiadis dalam Kuswartojo, T., & Salim, S. (1997), permukiman merupakan sebuah system yang terdiri dari lima unsur, yaitu: alam, masyarakat, manusia, lindungan dan jaringan. Bagian permukiman yang disebut wadah tersebut merupakan paduan tiga unsur: alam (tanah, air, udara), lindungan (shell) dan jaringan (networks), sedang isinya adalah manusia dan masyarakat. Alam merupakan unsur dasar dan di alam itulah ciptakan lindungan (rumah, gedung dan lainnya) sebagai tempat manusia tinggal serta menjalankan fungsi lain.

2. Persyaratan Permukiman

Dalam penentuan lokasi suatu permukiman, perlu adanya suatu kriteria atau persyaratan untuk menjadikan suatu lokasi sebagai lokasi permukiman. Kriteria tersebut antara lain:

1. Tersedianya lahan yang cukup bagi pembangunan lingkungan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial.
2. Bebas dari pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan, baik yang berasal dari sumber daya buatan atau dari sumber daya alam (gas beracun, sumber air beracun, dsb).
3. Terjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni.
4. Kondisi tanahnya bebas banjir dan memiliki kemiringan tanah 0-15 %, sehingga dapat dibuat sistem saluran air hujan (drainase) yang baik serta memiliki daya dukung yang memungkinkan untuk dibangun perumahan.
5. Adanya kepastian hukum bagi masyarakat penghuni terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. Lokasinya harus strategis dan tidak terganggu oleh kegiatan lainnya.
 - b. Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan, seperti pelayanan kesehatan, perdagangan, dan pendidikan.

- c. Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air.
- d. Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah.
- e. Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor, yang dapat dibuat dengan sistem individual yaitu tanki septik dan lapangan rembesan, ataupun tanki septik komunal.
- f. Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.
- g. Dilengkapi dengan fasilitas umum, seperti taman bermain untuk anak, lapangan atau taman, tempat beribadah, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala besarnya permukiman tersebut.
- h. Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon.

(Sumber: “Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun” Departemen PU)

3. Kualitas Lingkungan Permukiman

Dalam menilai kualitas lingkungan permukiman, patut dicermati bahwa lingkungan permukiman merupakan salah satu

elemen permukiman selain manusia dan masyarakat. Lingkungan permukiman berdasarkan penjelasan elemen permukiman di atas, dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu lingkungan alamiah (nature) dan lingkungan buatan (shell dan network).

Penilaian terhadap kualitas lingkungan alamiah bila dikaitkan dengan lokasi penelitian yang terletak di sentra industri kecil memiliki beberapa indikator yaitu ketersediaan air bersih, kualitas udara dan tingkat kebisingan. Kualitas air dinilai berdasarkan standar nasional yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1/BIRHUMAS/1975. Standar untuk kualitas air yang baik adalah tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbau. Selain penilaian terhadap kualitas, penilaian juga harus dilakukan terhadap aksesnya. Akses terhadap air bersih dikatakan baik bila tersedia untuk setiap rumah dan mengalir sepanjang waktu. Sementara itu, indikator terhadap kualitas udara dinyatakan dengan debu dan bau. Satwiko (2005) menyatakan bahwa udara yang berkualitas baik tidak berdebu dan tidak berbau. Untuk tingkat kebisingan, indikator dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 48/MenLH/11/1996. Tingkat kebisingan bunyi yang dapat dikatakan baik adalah maksimal 55 desibel. Penilaian terhadap kualitas lingkungan buatan memiliki dua elemen, yaitu

penilaian terhadap shell (fisik hunian) dan network (sarana prasarana lingkungan).

Penilaian terhadap hunian di Indonesia dapat didekati dengan indikator pencahayaan, penghawaan dan suhu udara. Ketiga hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah no 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat. Pencahayaan yang dimaksud adalah penggunaan terang langit yang dapat memastikan ruangan kegiatan mendapatkan cukup banyak cahaya dan merata di seluruh ruangan. Secara teknis, indikator ini dapat dinilai dengan luasan lubang pencahayaan yang minimum sebesar 10 % dari luasan lantai. Selain luasan lubang cahaya, indikator pencahayaan juga diukur dengan penerimaan sinar matahari langsung selama minimal 1 jam dalam satu hari.

Pada aspek penghawaan, kualitas hunian yang baik terjadi apabila terdapat aliran pergantian udara secara menerus melalui ventilasi maupun ruangan-ruangan dalam hunian. Hal ini ditandai dengan adanya ventilasi silang dengan lubang penghawaan minimal seluas 5 % dari luasan lantai hunian. Selain teknis luasan, juga terdapat tolokukur lokasi lubang penghawaan yang mengindikasikan kualitas hunian yang baik adalah bila tidak berasal dari dapur kamar mandi dan WC. Aspek terakhir di kualitas hunian

adalah suhu dan kelembaban. Indikator suhu dan kelembaban ini dapat dinilai baik jika saat beraktivitas penghuni tidak merasa pengap. Untuk pengukuran teknis, dapat didekati dengan keseimbangan volume udara masuk dan keluar dalam satu ruangan.

Pada elemen network dalam permukiman, kualitas network dapat dilihat pada beberapa tipe sarana dan prasarana lingkungan. Beberapa indikator mengenai sarana dan prasarana lingkungan dapat digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan. Jayadinata (1999) dalam Hidayati (2014) menyatakan bahwa kualitas permukiman dari elemen network dapat diukur dari keterjangkauan pusat kegiatan (seperti pusat kota dan tempat bekerja/CBD), pasar lokal, pusat pendidikan dan pusat olahraga. Standar jarak tempuh masing-masing sarana dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Jarak Maksimal Sarana dari Permukiman

No.	Sarana	Jarak Maksimal
1	Pusat Tempat Kerja	1½ km (20 menit) atau 2¼ km (30 menit)
2	Pusat Kota (CBD)	2¼ km atau 30 menit
3	Pasar Lokal	¼ km atau 10 menit
4	Sekolah Dasar	$\frac{3}{4}$ km atau 10 menit
5	Sekolah Menengah Pertama	1½ km atau 20 menit
6	Sekolah Menengah Atas	1½ km (20 menit) atau 2¼ km (30 menit)
7	Tempat olah raga	1½ km atau 20 menit

Sumber: Jayadinata, 1999 dalam Hidayati, 2014

Sementara itu, menurut sumber yang sama, prasarana permukiman yang menunjukkan kualitas network adalah jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan drainase dan sanitasi. Untuk standar kebutuhan listrik yang diperlukan setiap rumah adalah sebesar 900Va per rumah pada kawasan perkotaan dan 450 Va/rumah untuk permukiman di kawasan perdesaan. Sementara itu, untuk jaringan air bersih, indikatornya dapat didekati dari cara pemenuhannya (Keputusan Menteri Kesehatan RI No 492/MENKES/PER/IV/2010) yang dapat berasal perpipaan, sumber terlindungi, sumber tak terlindungi, atau tidak memiliki sumber (harus membeli). Indikator lain terkait dengan kuantitas airbersih yang terakses, yaitu minimal 150 liter/orang/hari berdasarkan Pedoman Perencanaan Lingkungan Perkotaan (1972). Untuk jaringan drainase, kualitas jaringan didekati dari fungsinya untuk mengalirkan air hujan maupun air limbah domestik. Keduanya dapat disediakan secara individu maupun secara komunal menurut SNI 0317332004).

Dalam pembangunan permukiman di Indonesia, studi terbaru yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengukuran indeks kualitas permukiman berkelanjutan yang dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2014. Dalam studi normatif ini dilakukan untuk mengukur kualitas permukiman

perkotaan Indonesia dengan beberapa sampel di kota-kota di Indonesia. Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas permukiman dari sisi lingkungan adalah dengan mengukur kualitas pada kondisi air minum, kondisi sanitasi, kondisi drainase, kondisi persampahan, kondisi penggunaan energi, kondisi hunian, kondisi udara, kondisi sungai, kondisi jalan lingkungan, dan kondisi ruang terbuka hijau (Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, 2014).

B. Kumuh

1. Pengertian Kumuh

Kumuh prasarana yang ada tidak sesuai, Kumuh adalah kesan atau gambaran standar yang berlaku, baik standar secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup persyaratan rumah sehat, kepadatan bangunan, kebutuhan sarana dan penghasilan kelas menengah. Dengan air bersih, sanitasi maupun persyaratan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai kelengkapan prasarana jalan, ruang tanda atau cap yang diberikan golongan terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan, (Sri Kurniasih, diakses tanggal 10/10/2010).

Wilayah kawasan kumuh menurut Bank Dunia (1999) merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan

perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial demografis di kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial budaya. Tumbuhnya kawasan kumuh terjadi karena tidak terbendungnya arus urbanisasi.

2. Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh menurut ILO 2008 dalam Edi Suharto 2009 : 69 adalah tempat tinggal yang kumuh, pendapatan yang rendah dan tidak menentu, serta lingkungan yang tidak sehat dan bahkan membahayakan dan hidup penuh resiko dan senantiasa dalam ancaman penyakit dan kematian.

Kawasan kumuh (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas) adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin (www.wikipedia.org, diakses 03/02/2011) Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia.

Kawasan kumuh umumnya dihubung-hubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Di berbagai negara miskin, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena

kondisinya yang tidak higienis. Di berbagai kawasan kumuh, khususnya di negara-negara miskin, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Kurangnya pelayanan pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang bertumpuk-tumpuk.

C. Permukiman Kumuh

1. Pengertian Permukiman Kumuh

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tidak mengenal adanya istilah kawasan kumuh, yang ada Permukiman kumuh dan Perumahan kumuh. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, (Pasal 1 Angka 13 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sedangkan Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Permukiman kumuh sering dilihat sebagai suatu kawasan yang identik dengan kawasan yang apatis, kelebihan penduduk, tidak mencukupi, tidak memadai, miskin, bobrok, berbahaya, tidak

aman, kotor, di bawah standar, tidak sehat dan masih banyak stigma negatif lainnya (Rahardjo Adisasmita, 2010). Dari beberapa kesan yang timbul dari permukiman kumuh dapat disimpulkan definisi dari permukiman kumuh itu sendiri, terdapat beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli, berikut penjelasannya : Permukiman kumuh yaitu permukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana, dan pelayanan minim adalah pengejawantahan kemiskinan (Tjuk Kuswartojo, 2005). Sedangkan menurut Parsudi Suparlan, permukiman kumuh adalah permukiman atau perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan, juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan atau semerawut. Pengertian lain dari permukiman kumuh juga diungkapkan oleh Johan Silas yaitu permukiman kumuh dapat diartikan menjadi dua bagian, yang pertama ialah kawasan yang proses pembentukannya karena keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota sehingga timbul kompetisi dalam menggunakan lahan perkotaan. Sedangkan kawasan permukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio permukiman kumuh. Dan yang kedua ialah kawasan yang lokasi penyebarannya secara geografis terdesak perkembangan kota yang semula baik,

lambat laun menjadi kumuh, yang menjadipenyebabnya adalah mobilitas sosial ekonomi yang stagnan.

2. Kriteria Permukiman Kumuh

Masrun (2009) memaparkan bahwa permukiman kumuh mengacu pada aspek lingkungan hunian atau komunitas. Permukiman kumuh dapat diartikan sebagai suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak mungkin dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya, bahkan dapat pula dikatakan bahwa para penghuninya benar-benar dalam lingkungan yang sangat membahayakan kehidupannya. Pada umumnya permukiman kumuh memiliki ciri ciri tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar, seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka / rekreasi, fasilitas pelayanan kesehatan dan perbelanjaan.

Johan Silas, seorang pakar dalam bidang arsitektur dan permukiman kumuh (Titisari dan Farid Kurniawan, 1999:8), menjelaskan bahwasanya kriteria pokok untuk menentukan permukiman kumuh/marjinal adalah: bila berada di lokasi yang

ilegal, dengan keadaan fisiknya yang sub standrat; penghasilan penghuni amat rendah (miskin), tak dapat dilayani berbagai fasilitas kota; dan tidak diingini kehadirannya oleh publik (kecuali yang berkepentingan). Berdasarkan kriteria Silas tersebut, aspek legalitas juga merupakan kriteria yang harus dipertimbangkan untuk menentukan kekumuhan suatu wilayah selain buruknya kondisi kualitas lingkungan yang ada.

Khomarudin (1997) lingkungan permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Lingkungan yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang per Ha),
2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah,
3. Jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya dibawah standar,
4. Sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan,
5. Hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan diatur perundang undangan yang berlaku.

Gambaran lingkungan kumuh, (Khomarudin,1997) adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan,
2. Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni,
3. Rumah hanya sekedar tempat untuk berindung dari panas dan hujan,
4. Hunian bersifat sementara dan dibangun di atas tanah bukan milik penghuni,
5. Lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur tanpa perencanaan,
6. Prasarana kurang (mck, air bersih, saluran buangan, listrik, jalan lingkungan),
7. Fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan),
8. Mata pencaharian yang tidak tetap dan usaha non-formal,
9. Pendidikan masyarakat rendah.

D. Program KOTAKU Dalam Mengatasi Kekumuhan

1. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-

2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Oleh karena itu, DJCK menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program KOTAKU.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

2. Tujuan Program KOTAKU

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha;
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik;
3. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan

5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “*outcome*” sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
2. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kota/kabupaten untuk mendukung program KOTAKU; dan Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh.

3. Strategi Pelaksanaan Program KOTAKU

Strategi pendampingan kotakku meliputi; penyusunan Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pendampingan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh perkotaan, keterpaduan penanganan permukiman kumuh perkotaan kementerian PUPR di 30 Kabupaten/Kota lokasi prioritas keterpaduan, program penanganan kumuh berbasis masyarakat dengan revitalisasi BKM dan penanggulangan kemiskinan ke penanganan kumuh (KOTAKU).

Perubahan peran BKM ini dari kondisi awal, dimana BKM berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, hanya mengelolah dana BLM, menyusun PJM pronangkis dan melaksanakan kegiatan infrastruktur, sosial dan ekonomi menjadi berorientasi kepada penanganan kumuh, menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) membangun infrastruktur permukiman yang berskala lingkungan, dan menjaga kualitas permukiman-permukiman yang didukung oleh perubahan perilaku masyarakat.

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas kumuh

2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring, penanganan kumh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat
3. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor
4. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM daerah dan rencana formal lainnya
5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan dan pengendalian
6. Meningkatkan akses, terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota, mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan
7. Advokasi kepastian, bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci
8. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

Pemerdayaan dalam program KOTAKU yang diberikan pemerintah berupa pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, untuk itu masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi. Keterlibatan masyarakat dalam program KOTAKU sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, masyarakat dilibatkan secara aktif dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta sampai pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan.

E. KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Filosofi Ilmu Perencanaan Pembangunan Kota Berbasis Masyarakat

Pada tahun 1994 UNCHS di Nairobi mendeklarasikan *The New Planning Paradigm*, yang pada intinya adalah bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan kota harus melalui/mempertimbangkan *Community-participation, involvement of all interest groups, subsidiary and interaction of phisycal and economic planning*. Yang kemudian diadopsi oleh masing-masing negara termasuk Indonesia dengan konsensus bahwa “masyarakat” lah yang menjadi target program-program publik.

Dalam sejarah perencanaan pembangunan kota, wilayah dan kawasan, munculnya berbagai pendekatan dengan terminologi

baru seperti *Bottom-up planning*, *democratic planning*, *grass root planning*, *public involvement*, *collaborative planning*, *advocacy planning*, dan sebagainya menunjukkan adanya kesamaan dalam hal filosofi dasar yaitu dalam suatu demokrasi anggota masyarakat harus memiliki kesempatan berperan serta.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan aktifitas memperkenalkan baik itu aturan, program atau kebijaksanaan dan sebagainya kepada masyarakat. Mc Gee dalam Maria, (2000 : 29), mengemukakan bahwa peran serta masyarakat sangat tergantung pada kesediaan informasi yang disalurkan ke atas atau ke bawah, informasi yang disalurkan ke atas, umumnya berupa masukan bagi atasan untuk memperbaiki, menyempurnakan dan atau membuat keputusan baru; sedangkan informasi yang disalurkan di bawah umumnya berupa penjelasan tentang tugas/program, kebijaksanaan, peraturan dan sejenisnya (sosialisasi Perda mengenai Rencana Tata Ruang Kota Termasuk dalam jenis komunikasi ini).

Upaya untuk menyalurkan informasi dalam rangka mensosialisasikan peraturan dan program, tentunya harus berlangsung dalam suatu suasana komunikasi yang komunikatif antara komunikator dan komunikan. Menurut Effendi dalam Maria, (2000 : 30) menyalurkan suatu informasi dapat dilakukan secara

langsung (*face to face*) maupun tidak langsung (melalui media) Penggunaan media dalam proses sosialisasi hendaknya diperlihatkan efektifitasnya agar mudah diterima masyarakat, Mubyarto dan Kartodirdjo S dalam Maria (2000 : 30) dalam ringkasan hasil penelitiannya mengatakan bahwa menyampaikan pesan media dan penyuluhan lokal sangat mempengaruhi, menyampaikan pesan melalui forum lebih efektif dari pada menggunakan media massa. Pesan yang disampaikan melalui media massa masih memerlukan perantara agar mudah diterima.

3. Urgensi Partisipasi Masyarakat

Paradigma baru penataan ruang di perkotaan saat ini, adalah melibatkan peran serta masyarakat dalam pengaturan dan pemanfaatan ruang kota. Sehingga pola pemanfaatan ruang kota yang di tetapkan tersebut dapat menghindari timbulnya masalah terutama perampasan hak masyarakat dalam kebebasan memanfaatkan ruang kota.

Mubyanto dan Kertodirdjo dalam Maria, (2000 : 25), mengemukakan faktor-faktor itu mengandung banyak variabel yang memengaruhi derajat peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan; variabel-variabel tersebut dijabarkan dalam faktor-faktor yaitu faktor sosial ekonomi mencakup variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status pemilikan

lahan dan penguasaan lahan/tanah, jumlah tanggungan keluarga, jumlah tenaga kerja keluarga dan tingkat kesehatan. Faktor sosial budaya mencakup variabel norma, nilai, kepercayaan, pengetahuan dan simbol. Faktor teknologi mencakup cara-cara dan alat-alat yang digunakan dan pelayanan penyuluhan (sosialisasi). Faktor policy pemerintah mencakup variabel sikap koordinatif, kepemimpinan lembaga sosial, pendekatan untuk memotivasi masyarakat, tingkat kebebasan untuk menyatakan pendapat dan keinginan-keinginan masyarakat.

Selanjutnya bahwa pengurusan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan aparat birokrasi membutuhkan suatu proses dan pelayanan yang baik dari aparat pemerintah. Pelayanan cepat yang dilayani secara otomatis akan memotivasi masyarakat untuk menyesuaikan suatu program atau aturan. Dengan demikian menurut Moenir dalam Maria, (2000: 26) efektifitas pelayanan merupakan faktor yang turut mempengaruhi peran serta masyarakat.

4. Strategi Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

Strategi pembangunan berbasis masyarakat bersifat sangat struktural sehingga secara nasional diharapkan dapat berlaku dalam waktu yang cukup, dapat mengakomodasi berbagai macam konstektural masing-masing daerah, lebih dapat mempermudah

perjalanan yang sistematis pada tingkat yang lebih operasional oleh para pelaku pembangunan di bidang infrastruktur, baik dalam bentuk rencana, program, proyek, maupun kegiatan.

Strategi untuk melaksanakan pembangunan untuk dapat mencapai pembangunan yang signifikan ialah:

1. melembagakan sistem penyelenggara pembangunan infrastruktur dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, melalui strategi pengembangan peraturan perundang-undangan dan pemantapan kelembagaan di bidang infrastruktur, serta memfasilitasi pelaksana penataan pembangunan infrastruktur yang transparan dan partisipatif.
2. mewujudkan pemenuhan kebutuhan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang layak dan terjangkau, dengan menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah.
3. Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jati diri, kemandirian, dan produktivitas masyarakat, melalui perwujudan kondisi lingkungan permukiman yang responsive dan berkelanjutan.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah rencana pembangunan yang sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Tjokroamidjojo keterlibatan masyarakat dapat lebih terlaksana apabila rencana pembangunan itu sendiri berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Uraian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilihat dari berbagai pendekatan disiplin ilmu, sebagai berikut:

- a. Dalam konsep psikologi, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat sangat ditentukan oleh motivasi yang melatar-belakanginya yang merupakan cerminan dari dorongan, tekanan, kebutuhan, keinginan, dan harapan-harapan yang diharapkan.
- b. Secara sosiologis, sikap merupakan fungsi dari kepentingan, dengan demikian, tumbuh dan berkembangnya partisipasi dalam masyarakat akan sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap tingkat kepentingan dari pesan-pesan yang disampaikan kepadanya.

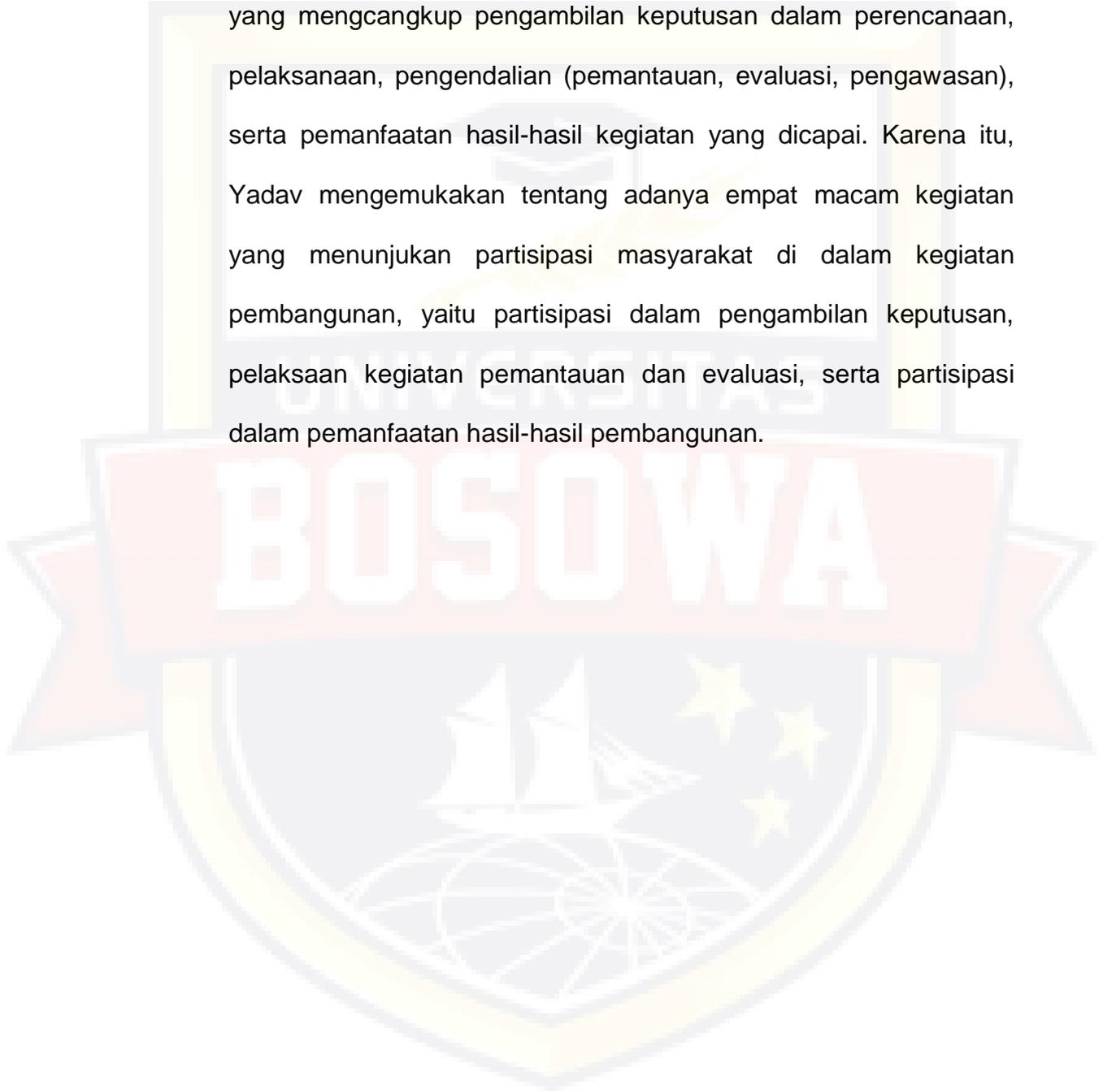
- c. Menurut konsep pendidikan, partisipasi masyarakat merupakan tanggapan atau respon yang diberikan terhadap setiap rangsangan atau stimulus yang diberikan, yang dalam hal ini, respon merupakan fungsi dari manfaat *reward* yang dapat diharapkan.
- d. Berdasarkan harapan dalam konsep ekonomi sangat ditentukan oleh besarnya peluang dan harga dari manfaat yang akan diperoleh. Tentang manfaat itu sendiri, dapat dibedakan dalam manfaat ekonomi maupun non-ekonomi (yang dapat dibedakan dalam: kekuasaan, persahabatan/kebersamaan dan prestasi).

Faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan terdapat dua faktor besar yaitu faktor kebutuhan/kepentingan dan faktor manfaat. Maka dari program pembangunan yang berbasis partisipasi harus mempertimbangkan kebutuhan atau kepentingan masyarakat yang bersangkutan serta seberapa besarkah manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Sehingga program sesuai dengan kepentingan/kebutuhan masyarakat dan dapat diambil manfaatnya maka akan mempengaruhi sikap masyarakat untuk berpartisipasi.

6. Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik

karena alasan-alasan dari dalam (*intrinsik*) maupun dari luar (*ekstrinsik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Karena itu, Yadav mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

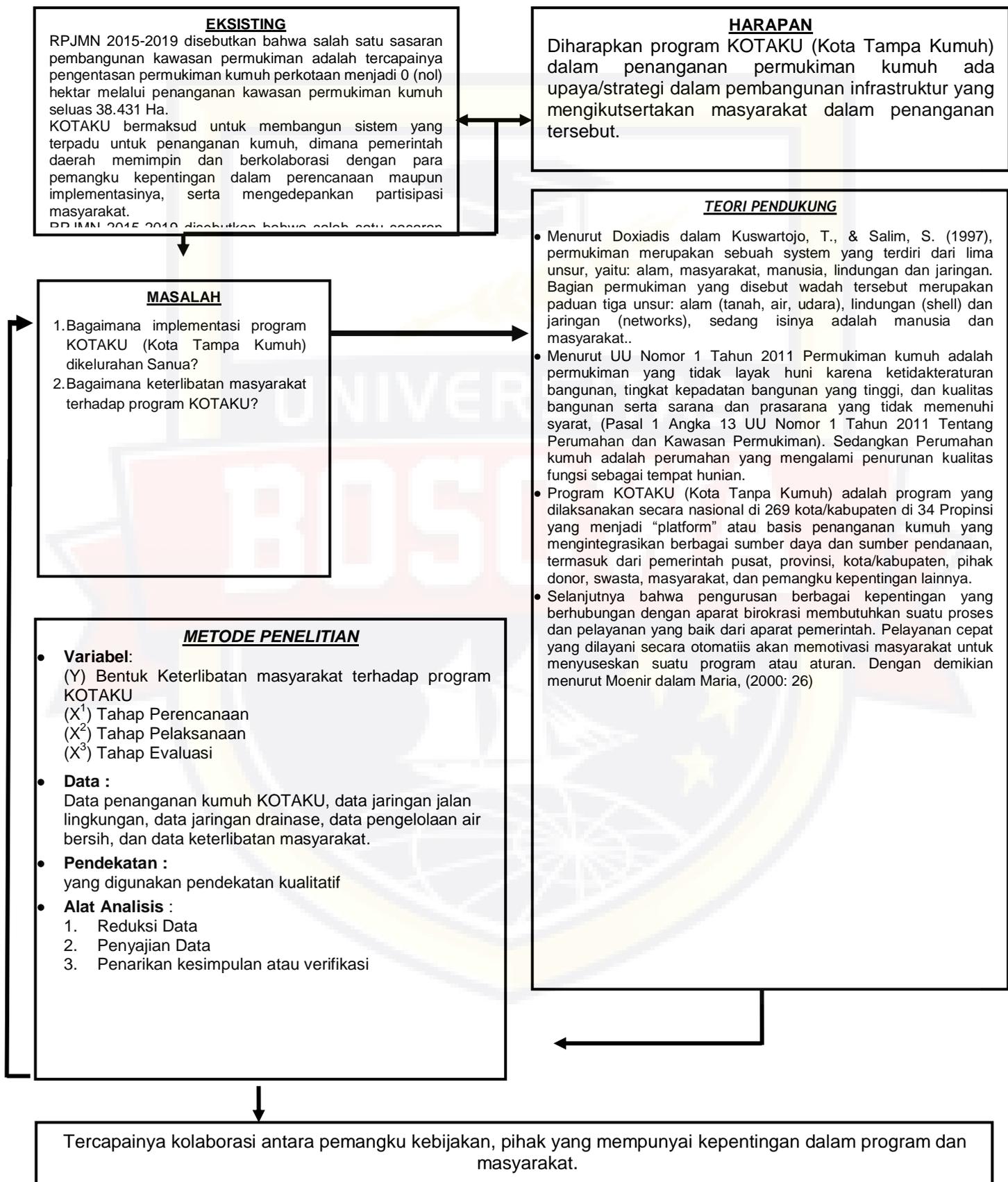


BOSOWA

Penelitian Terdahulu

1. Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)
 - Tahun : 2013
 - Jenis Pustaka : Jurnal Administrasi Publik (JAP)
 - Bentuk Pustaka : Elektronik
 - Nama Penulis : Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo
 - Nama Jurnal : Jurnal Sosiologi Pedesaan
- 2 Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa
 - Tahun : 2014
 - Jenis Pustaka : Jurnal
 - Bentuk Pustaka : Elektronik
 - Nama Penulis : Syahrul Syamsi
 - Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 3 Judul : Pengaruh Implementasi Program Dana Pembangunan Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Pangkoh Sari Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau
 - Tahun : 2010
 - Jenis Pustaka : Jurnal
 - Bentuk Pustaka : Elektronik
 - Nama Penulis : Supriyadi
 - Nama Jurnal : Jurnal Manajemen dan Akuntansi

F. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

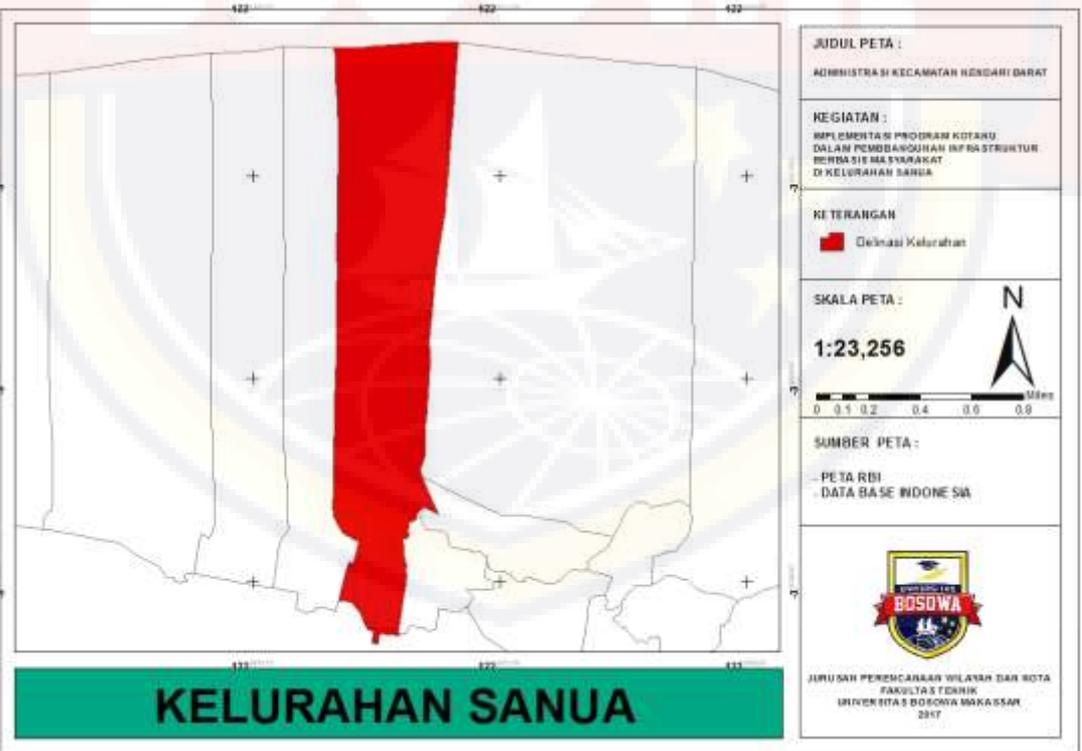
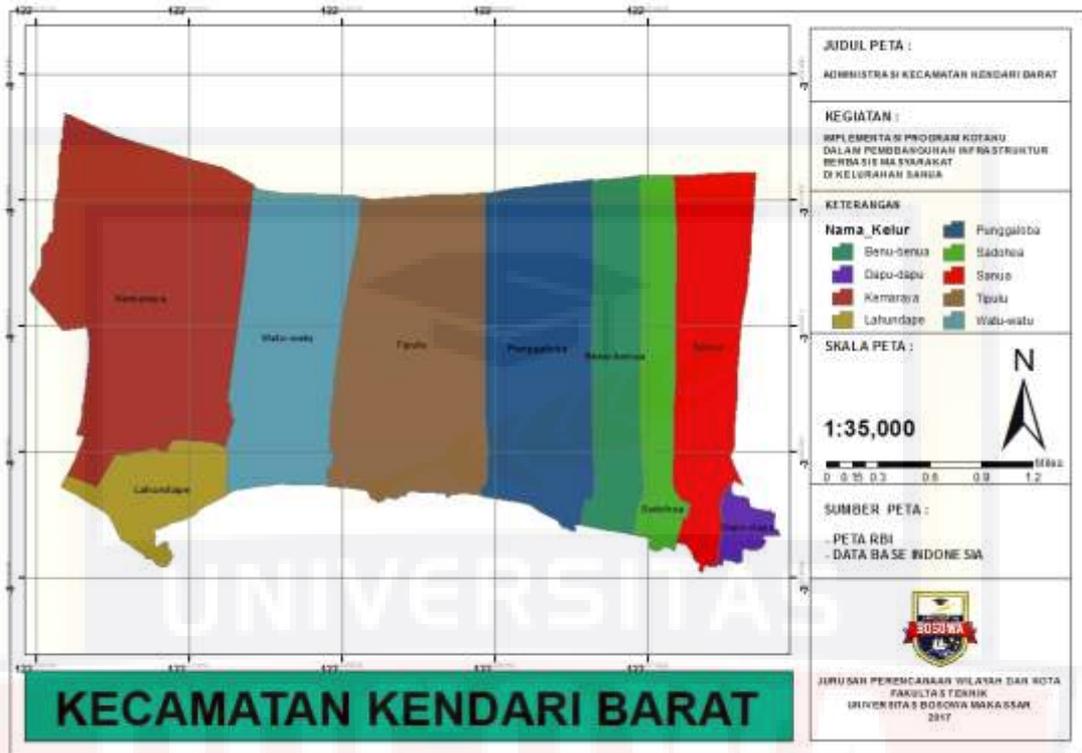
Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan lokasi penelitian di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat. Dengan pertimbangan pemilihan lokasi di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat ini, agar dapat diketahui implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilaksanakan mulai bulan Desember 2017 sampai dengan Bulan Maret 2018.

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Skripsi Tahun 2017

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Asistensi Bab (1,2,3)																
2	Persiapan Survey Lapangan																
3	Pelaksanaan Survey Lapangan																
4	Penginputan Data Hasil Survey																
5	Asistensi Bab (4 dan 5)																
6	Pembuatan Daftar Isi, Tabel, dan Gambar																
7	Print Skripsi																
8	Penjilitan Skripsi																



C. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif informan yang dikumpulkan harus tetap dan tidak dipengaruhi oleh pendapat sendiri. Jenis penelitian ini memiliki asumsi seperti: penelitian kualitatif memberikan proses, bukan hasil atau produk penelitian, penelitian kualitatif tertarik pada makna atau bagaimana orang merasakan hidupnya, pengalaman dan struktur dunia mereka, penelitian kualitatif adalah instrument utama untuk pengumpulan data dan analisis.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan tipe deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai kinerja Program KOTAKU dalam melaksanakan program di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.

Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

D. Populasi Dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi ialah semua nilai baik hasil penghitungan maupun pengukuran baik kualitatif maupun kuantitatif. Populasi dalam penelitian harus disebut secara tersurat yaitu yang berkenan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang dicangkup.

Tujuan diadakan populasi ialah agar kita dapat membentuk besarnya anggota sample yang diambil dari anggota populasi yang tidak terbatas (tak terhingga) maka penelitian ini disebut dengan sample total atau sensus.

Dalam objek penelitian ini jumlah masyarakat yang ada di Kelurahan Sanua kecamatan Kendari barat Kota Kendari 3760 jiwa. Populasi dalam penelitian ini tokoh masyarakat dan masyarakat.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sekelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karateristik populasi juga dimiliki sample. Fergusen mendefinisikan sample adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi yang menggambarkan populasi tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pemilihan subjek dengan metode *purposive smpling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, dan anggota sample yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian, di dukung dengan *snowball sampling*, yaitu teknik penentuan sample yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudia sample ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sample semakinn banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Dengan menentukan karateristik masyarakat daerah tesebut agar berguna untuk mereduksi anggota populasi menjadi anggota sample yang mewakili populasinya, sehingga kesimpulan populasi dapat dipertanggung jawabkan, serta dapat memenuhi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sampai semua data terpenuhi, dengan memilih orang yang benar-benar memahami realitas yang terjadi, yakni informan yang terdiri atas seluruh masyarakat wilayah tersebut dan pelaksanaan program KOTAKU (kota Tanpa Kumuh).

Berdasarkan penjelasan diatas kriteria untuk menentukan sample dalam penelitian ini adalah :

1. Tokoh masyarakat

- a. Menjabat sebagai ketua kelurahan
- b. Menjabat sebagai RT dilingkungan 1,2 dan 7
- c. Sudah menjadi anggota BKM (Badan Kesusembadaan Masyarakat)
- d. Warga asli Kelurahan Sanua
- e. Berpartisipasif dalam segala kegiatan program KOTAKU
- f. Mengetahui dinamika pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Sanua.

Berdasarkan kriteria diatas maka peneliti mengambil sample sebanyak 2 orang yang memenuhi syarat untuk dijadikan sample.

2. Warga masyarakat Kelurahan Sanua

- a. Warga masyarakat yang berdomisili minimal 10 tahun di kelurahan Sanua
- b. Sudah menjadi anggota LKM
- c. Dapat menjelaskan kehidupan masyarakat sebelum adanya program KOTAKU dan sesudah di implementasikannya program KOTAKU
- d. Berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan program KOTAKU

Berdasarkan kriteria yang telah di tentukan di atas, maka peneliti mengambil 9 orang sample yang terdiri dari 2 orang tokoh masyarakat dan 7 orang warga masyarakat.

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga variabel yaitu :

- a) Data Primer, adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data.
- b) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui study pustaka (library research) untuk mengumpulkan data - data melalui buku - buku, peraturan – peraturan, serta dokumen - dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian.
 1. Pedoman Umum Program KOTAKU (Direktur Dirjen Cipta Karya 2015).
 2. Laporan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Sanua.
 3. Data BPS Kecamatan Kendari Barat dalam angka.
 4. Proposal Minat Program PLPBK Kelurahan Sanua.

2. Sumber Data

Berdasarkan tiga variabel data yang terdapat pada jenis data baik primer maupun sekunder, yang mana pengumpulan datanya dilakukan dengan survey langsung di lapangan yang menyangkut prosedur kerja dan bahkan pencatatan data dengan melihat langsung keadaan sebenarnya, menyangkut hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengambilan data primer dan sekunder dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : observasi atau pengamatan lapangan, interview, dokumentasi yang terdapat di Kelurahan Sanua.

- 1) Metode observasi adalah kegiatan pengamatan langsung yang dilakukan di lokasi penelitian yang dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lokasi penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang tidak terungkap dalam dokumentasi-dokumentasi.
- 2) Metode interview adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan informan kunci. Proses tanya jawab bersifat tidak terstruktur, tetapi informan yang di interview merupakan informan yang mengerti dan paham dalam penelitian ini.

- 3) Metode dokumentasi dan pengukuran adalah teknik pengambilan data dengan melakukan melihat, mendokumentasikan, mencatat dan mengukur segala sesuatu yang terkait dengan objek penelitian yaitu di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.

G. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang nilainya dapat berubah-ubah.

Dalam penelitian ini untuk memudahkan penulis dalam mengkaji dan menganalisis apa yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, maka variabel yang di gunakan dalam penelitian ini ialah :

Y = Bentuk Keterlibatan Masyarakat terhadap Program KOTAKU

X¹ = Tahap Pelaksanaan

X² = Tahap Perencanaan

X³ = Tahap Evaluasi

H. Metode Analisis Data

Menurut Bogman analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahannya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuan data ini dapat di informasikan kepada orang lain. (Sugiyono. 2012:224)

Dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun pada pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan juga membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.

Untuk menganalisis data yang terkumpul sehingga diperoleh kesimpulan yang valid, maka ditempuh langkah-langka sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentranformasian data “mentah”. Yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita ketahui reduksi data terjadi secara

kontinyu melalui kehidupan suatu obyek yang diorientasikan secara kualitatif. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh penelitian secara terus menerus saat melakukan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang dihipon dilapangan mengenai pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat melalui program KOTAKU (kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.

b. Penyajian Data

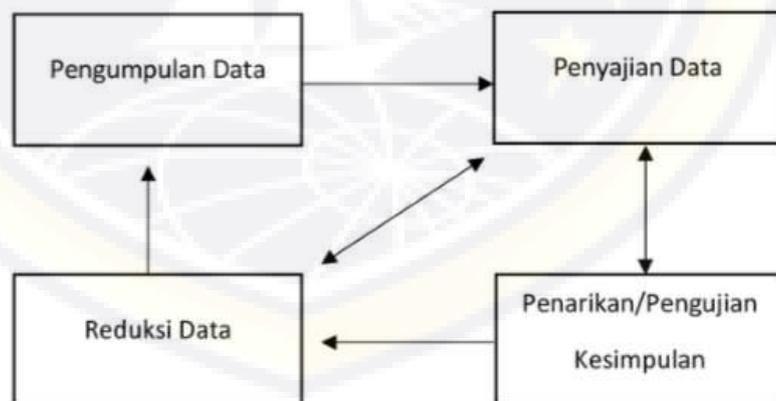
Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Muhammad Idrus bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan

pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Kegiatan analisis yang ketiga yang paling penting adalah penarikan kesimpulan verifikasi. Verifikasi data penelitian yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian penelitian mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pengujian ini dimaksud untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya. Pada tahap ini peneliti melakukan kajian dengan simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksud untuk melihat kebenaran analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.



Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif

I. Definisi Operasional Penelitian

Operasional adalah suatu proses penentuan ukuran suatu variable. Proses Operasionalisasi Variabel yang harus dilakukan adalah mengembalikan variabel penelitian ke bentuk awal, yaitu konsep penelitian. Peneliti harus mendefinisikan konsep penelitian sesuai dengan definisi-definisi yang telah diberikan oleh para ahli yang relevan dengan konsep penelitiannya. Jika konsep penelitiannya adalah “Keterlibatan masyarakat dalam program KOTAKU”, maka peneliti harus menemukan definisi “Keterlibatan Masyarakat” yang telah banyak diakui kebenarannya oleh para pakar di bidang tersebut.

Dalam tahapan ini studi kepustakaan menjadi salah satu tahap yang harus dilalui. Melalui studi kepustakaan yang mendalam dan memadai, peneliti akan mampu merumuskan definisi konsep penelitiannya dengan benar. Jadi ketika konsep penelitiannya adalah tentang “Keterlibatan masyarakat dalam program” maka kepustakaan atau literatur tentang konsep tersebut harus benar-benar dipahami dengan baik oleh peneliti, perlu diketahui, tidak sedikit kita menemukan satu konsep dengan definisi yang berbeda.

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Kendari

1. Letak Geografis dan Administrasi

Wilayah Kota Kendari terletak di sebelah Tenggara Pulau Sulawesi. Wilayah daratannya terdapat di daratan Pulau Sulawesi mengelilingi Teluk Kendari. Terdapat satu pulau pada wilayah kota Kendari yang dikenal sebagai Pulau Bungkutoko. Luas wilayah daratan Kota Kendari 267,37 Km² atau 0,7 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah Kota Kendari dengan ibu kotanya Kendari dan sekaligus juga sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara secara astronomis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa berada di antara 3o54' 30"- 4o3'11" Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur diantara 122o23'-122o39' Bujur Timur. Sepintas tentang posisi geografisnya, Kota Kendari memiliki batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Kendari ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan.

Luas wilayah menurut Kecamatan sangat beragam. Kecamatan Baruga merupakan wilayah kecamatan yang paling luas (17,95%), selanjutnya Kecamatan Abeli (16,40%), Kecamatan Puuwatu (14,86%), Kecamatan Poasia (14,12%), Kecamatan Kambu (9,21%), Kecamatan Mandonga (7,77%), Kecamatan Kendari Barat (7,15%), Kecamatan Kendari (5,86%), Kecamatan Wua-Wua (4,17%), dan Kecamatan Kadia (2,51%).

Tabel 4.1 Luas wilayah Kota Kendari Berdasarkan Administrasi Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Mandonga	20,77	7,77
2	Baruga	48,00	17,95
3	Puuwatu	39,72	14,86
4	Kadia	6,71	2,51
5	Wua-wua	11,16	4,17
6	Poasia	37,74	14,12
7	Abeli	43,85	16,40
8	Kambu	24,63	9,21
9	Kendari	15,68	5,86
10	Kendari Barat	19,11	7,15
Jumlah		267,37	100,00

Sumber: BPS Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2016

Topografi wilayah Kota Kendari pada dasarnya bervariasi antara datar dan berbukit. Daerah datar yang terdapat di bagian Barat dan Selatan Teluk Kendari. Kecamatan Kendari yang terletak di sebelah Utara teluk sebagian besar terdiri dari perbukitan (Pegunungan Nipa-nipa) dengan ketinggian \pm 459 M dari permukaan laut, sedangkan ke arah Selatan tingkat kemiringan antara 4% -30%, bagian Barat (Kecamatan Mandonga) dan selatan (Kecamatan Poasia) terdiri dari daerah perbukitan bergelombang rendah dengan kemiringan ke arah Teluk Kendari. Dilihat berdasarkan ketinggian wilayah kota Kendari di atas permukaan laut, kecamatan Mandonga merupakan wilayah tertinggi berada pada ketinggian 30 meter di atas permukaan laut.

3. Iklim dan Musim

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kota Kendari dikenal 2 (dua) musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Keadaan musim sangat dipengaruhi oleh arus angin yang bertiup di atas wilayah Kota Kendari. Sekitar bulan April, arus angin selalu tidak menentu dengan curah hujan yang tidak merata. Musim ini dikenal dengan musim “panca roba”, atau peralihan antara musim hujan dan musim kemarau. Pada bulan Mei sampai dengan Bulan Agustus, angin bertiup dari arah Timur berasal dari Benua Australia yang mengandung uap air. Pada Bulan Agustus

sampai dengan Bulan Oktober terjadi musim kemarau. Kemudian pada Bulan November sampai dengan Bulan Maret angin bertiup banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik, setelah melewati beberapa lautan. Pada bulan-bulan tersebut di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya biasanya terjadi musim hujan. Menurut data yang ada memberikan indikasi bahwa di Kota Kendari Tahun 2007 terjadi 203 hh (hari hujan) dengan curah hujan 3.467 mm.

4. Suhu Udara

Suhu udara dipengaruhi oleh berbagai macam faktor perbedaan ketinggian dari permukaan laut, daerah pegunungan dan daerah pesisir mengakibatkan keadaan suhu yang sedikit beda untuk masing-masing tempat dalam suatu wilayah. Secara keseluruhan, wilayah Kota Kendari merupakan daerah bersuhu tropis. Menurut data yang diperoleh dari Pangkalan Udara Wolter Monginsidi Kendari selama Tahun 2007 suhu udara maksimum $32,25^{\circ}\text{C}$ dan minimum $21,17^{\circ}\text{C}$. Tekanan udara rata-rata 1,009.1 mili bar dengan kelembaban udara rata-rata 77,50%. Kecepatan angin di Kota Kendari selama Tahun 2007 pada umumnya berjalan normal, mencapai 3,75 m/detik.

5. Geologi

Secara umum, keadaan tanah (soil) kota Kendari ini terdiri dari tanah liat bercampur pasir halus dan berbatu. Diperkirakan sebagai jenis aluvium berwarna coklat keputih-putihan dan ditutupi batuan pratersier terdiri dari batuan batu lempung bergelimer, batu pasir dan kwarsa. Dibagian pantai batuan pratersier tersebut ditutupi batuan terumbu gamping. Keadaan batuan yang demikian umumnya tidak meluas air atau kedap air.

Adapun persebaran dan jenis batuan yang terdapat di Kota Kendari adalah sebagai berikut :

1. Batu pasir Kuarsit, Serpih Hitam Batu Sabak, Batu Gamping dan Batu Lanau tersebut di Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga sebagian utara sampai perbatasan dengan Kecamatan Soropia, tepatnya di Kawasan Hutan Raya Murhum.
2. Endapan eluvium Pasir, lempung dan lumpur , tersebar dipesisir pantai Teluk Kendari dan disekitar sungai-sungai yang mengalir di Kota Kendari.
3. Batu Gamping Oral dan Batu Pasir yang tersebar di Pulau Bungkutoko, pesisir pantai Kelurahan Purirano dan Kelurahan Mata, serta Kecamatan Mandonga kearah Barat Laut, yang dibatasi Jalan R. Soeprapto Jalan Imam Bonjol dan batas antara Kota Kendari dengan Kecamatan Sampara.

4. Konglomerat dan Batu Pasir , tersebar disepanjang kiri kanan jalan poros antara Kota Lama dengan Tugu Simpang tiga Mandonga, bagian tengah Kecamatan Mandonga dan Bagian Barat Kecamatan Baruga serta bagian tengah Kecamatan Poasia sampai kearah selatan, yaitu kawasan rencana kompleks perkantoran 1.000 Ha kearah pegunungan Nanga-Nanga.
5. Filit, Batu Sabak, Batu Pasir Malik Kuarsa Kalsiulit, Napai, Batu Lumpur dan Kalkarenit Lempung, tersebar di arah tenggara Kecamatan Poasia tepatnya Kelurahan Talia, Kelurahan Abeli, Kelurahan Anggalomelai, Kelurahan Tobimeita, Kelurahan Benuanirae dan Kelurahan Anggoeya.
6. Konglomerat Batu Pasir, Batu Lanau dan Batu Lempung, tersebar di Kecamatan Poasia bagian timur yaitu di Kelurahan Petoaha, Kelurahan Sambuli dan Kelurahan Nambo serta sebagian Kelurahan Tondonggeu.
7. Batu Gamping, Batu Pasir dan Batu Lempung , tersebar dibagian barat Kecamatan Mandonga sampai dengan batas Kota Kendari dengan Kecamatan Sampara dan Kecamatan Ranomeeto.

Sedangkan, berdasarkan klasifikasi tanah taxonomy USDA, 1998, maka kondisi tanah di Kota Kendari cukup beragam, yaitu Endoaquents, Fluaquents, Epiaquepts,

Endoaquaquepts, Haplustepts, Haplustalfs, Sulfaquents, dan Sulfaquepts. Tekstur tanahnya didominasi oleh pasir.

Adapun dari segi geologisnya, Kota Kendari secara makro terdiri dari beberapa sistem lahan dan litologi yaitu Punggung metamorfik terorientasi terjal, Dataran bergelombang yang berbukit kecil di atas napal dan batu gamping, Dataran gabungan endapan muara dan sungai, Dataran berbukit kecil di atas batuan metamorfik campuran, Punggung bukit sedimen asimetrik tak terorientasi, Kipas aluvial non vulkanik yang melerang landai, Gunung karstik di atas marmer, Dataran lumpur antar pasang surut di bawah halofit, Dataran sedimen campuran yang berombak sampai bergelombang, Bukit karst di atas marmer dan batu gamping, Kipas aluvial non vulkanik yang melereng sedang dan Dataran berbukit kecil di atas batu sedimen campuran. Berdasarkan peta Hazard Gempa Indonesia 2010 yang telah disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum 2010, maka Kota Kendari termasuk daerah dengan kerawanan gempa tingkat sedang, dengan nilai spektrum respon percepatan 1 detik di batuan dasar S_B untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun (redaman 5%) adalah 0,15-0,2 g.

B. Gambaran Umum Kecamatan Kendari Barat

1. Letak Geografis dan Administrasi

Kecamatan Kendari Barat adalah salah satu kecamatan di Kota Kendari hasil pemekaran dari Kecamatan Kendari. Kecamatan Kendari Barat memiliki luas wilayah sebesar 22,41 Km² atau sebesar 7,57% dari luas wilayah Kota Kendari. Apabila ditinjau dari peta Kota Kendari, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 3°56'11" - 3°58'23" Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 122°31'12" - 122°34'58" Bujur Timur. Adapun batas administrasinya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kendari,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Kendari
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mandogga.

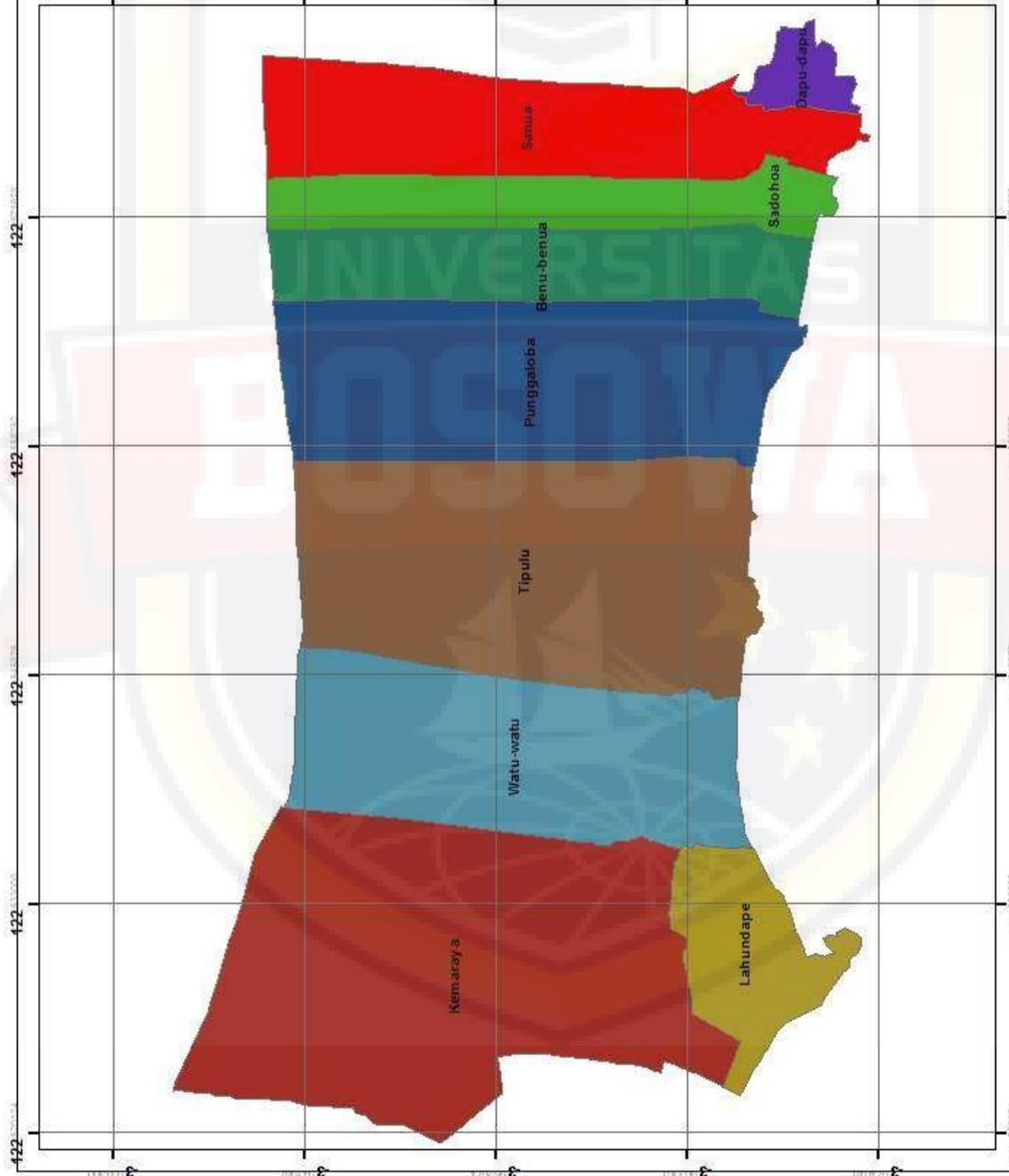
Saat ini, Kecamatan Kendari Barat terdiri dari 9 kelurahan dengan luas wilayah yang beragam, berturut-turut yaitu Kelurahan Kemaraya dengan luas 5,41 Km² (24,14%), kelurahan Watu-Watu dengan luas 2,15 Km² (9,59%), Kelurahan Tipulu dengan luas 3,72 Km² (16,60%), Kelurahan Punggaloba dengan luas 3,06 Km² (13,65%), Kelurahan Benu-Benua dengan luas 1,75 Km²

(7,81%), Kelurahan Sodohoa dengan luas 2,19 Km² (9,77%), Kelurahan Sanua dengan luas 2,20 Km² (9,82%), Kelurahan Dapu-Dapura dengan luas 0,57 Km² (2,54%) dan Kelurahan Lahundape dengan luas 1,36 Km² (6,07%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Luas Wilayah Kecamatan Kendari Barat Menurut Kelurahan Tahun 2016

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persent (%)
1.	Kemaraya	5,41	24,14
2.	Watu-watu	2,15	9,59
3.	Tipulu	3,72	16,60
4.	Punggaloba	3,06	13,66
5.	Benu-benua	1,75	7,81
6.	Sodohoa	2,19	9,77
7.	Sanua	2,20	9,82
8.	Dapu –Dapura	0,57	2,54
9.	Lahundape	1,36	6,07
Jumlah		22,41	100

Sumber: BPS Kecamatan Kendari Barat Tahun 2016



JUDUL PETA :

ADMINISTRASI KECAMATAN KENDARI BARAT

KEGIATAN :

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
BERBASIS MASYARAKAT
DI KELURAHAN SANUA

KETERANGAN

- | | | |
|-------------------|------------|------------|
| Nama_Kelur | | Punggaloba |
| | Benu-benua | Sadohoa |
| | Dapu-dapu | Sanua |
| | Kemaraya | Tipulu |
| | Lahundape | Watu-watu |

SKALA PETA :

1:35,000



SUMBER PETA :

- PETA RBI
- DATA BASE INDONESIA



JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2017

KECAMATAN KENDARI BARAT

Keadaan Iklim Kecamatan Kendari Barat bersumber dari Stasiun Maritim Kendari. Rata-rata suhu udara Tahun 2016 Kecamatan Kendari Barat terbagi menjadi rata-rata suhu minimum yaitu $24,73^{\circ}\text{C}$ dan rata-rata suhu maksimum yaitu $31,73^{\circ}\text{C}$.

Suhu udara tertinggi di Kecamatan Kendari Barat berada pada bulan November Tahun 2016. Hal ini dikarenakan pada bulan November Kota Kendari sedang berada di musim kemarau yang dimulai pada bulan Agustus. Walaupun pada bulan November, jumlah hari hujannya bukanlah jumlah hari hujan terendah sepanjang tahun 2016 yakni 10 Hari tapi, jumlah curah hujan pada bulan tersebut sangat rendah yaitu 41 mm dengan rata-rata kelembapan udara sebesar 81°C . Suhu udara terendah pada tahun 2016 di Kecamatan Kendari Barat terjadi pada bulan Juli dengan rata-rata suhu udara $26,5^{\circ}\text{C}$. Pada bulan tersebut jumlah hari hujannya sebesar 17 hari dan Curah hujannya sebesar 162,3 mm, nilai hari hujan dan curah hujan pada bulan Juli bukanlah hari hujan dan curah hujan tertinggi sepanjang tahun. Jumlah hari hujan tertinggi jatuh pada bulan maret sebesar 26 hari hujan dengan curah hujan sebesar 359,3 mm.

Rata-rata Kelembapan udara sepanjang tahun 2016 di Kecamatan Kendari Barat adalah $83,67^{\circ}\text{C}$ dengan nilai minimum $56,50^{\circ}\text{C}$ dan maksimum $97,83^{\circ}\text{C}$.

3. Geologi

Secara umum, keadaan tanah (soil) Kecamatan Kendari Barat ini terdiri dari tanah liat bercampur pasir halus dan berbatu. Diperkirakan sebagai jenis aluvium berwarna coklat keputih-putihan dan ditutupi batuan pratersier terdiri dari batuan batu lempung bergelimer, batu pasir dan kwarsa. Dibagian pantai batuan pratersier tersebut ditutupi batuan terumbu gamping. Keadaan batuan yang demikian umumnya tidak meluas air atau kedap air.

C. Gambaran Umum Kelurahan sanua

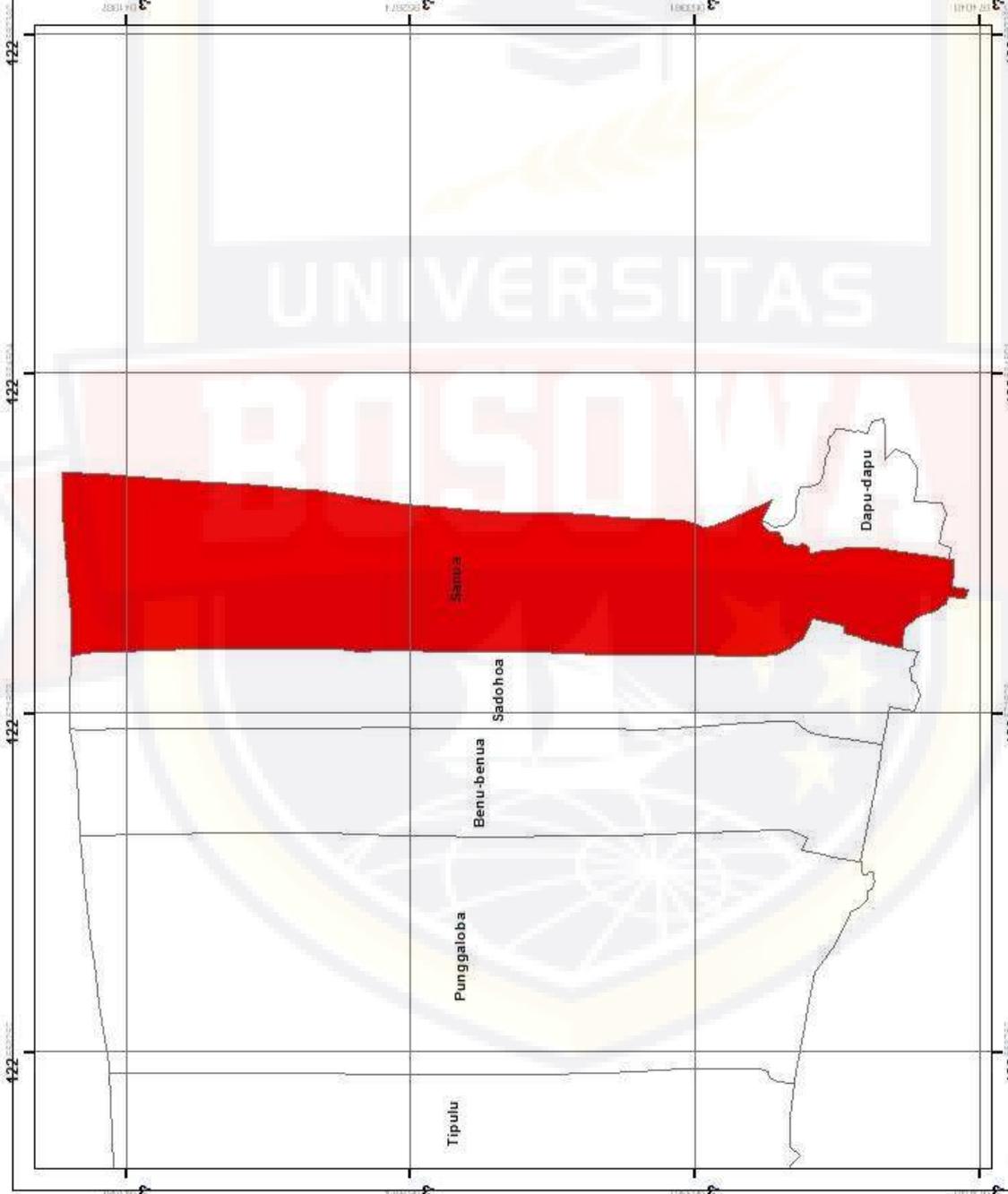
1. Letak Geografis dan Administrasi

Secara geografis, Kelurahan sanua terletak membentang di arah barat Kota Kendari tepatnya di Kecamatan Kendari Barat, Sulawesi Tenggara Kelurahan Sanua terdiri dari 6 RW dan 17 RT dengan Luas wilayah Kelurahan sebesar 163 hektar. Adapun batas administrasi Kelurahan Sanua adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gunung Jati dan Tahura Nipa-nipa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan teluk Kendari.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dapu-dapura.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sodohoa.

2. Data Kependudukan

Kelurahan Sanua berjumlah 3760 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari wanita. Penduduk terbanyak terdapat di RW 1 yaitu sebanyak 986 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di RW 4 yaitu sebanyak 143 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:



JUDUL PETA :

ADMINISTRASI KELURAHAN SANUA

KEGIATAN :

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
BERBASIS MASYARAKAT
DI KELURAHAN SANUA

KETERANGAN

Nama_Kelur

- Benu-benu
- Dapu-dapu
- Kemaraya
- Lahundape
- Punggaloba
- Sadohoa
- Sanua
- Tipulu
- Watu-watu

SKALA PETA :

1:23,574



SUMBER PETA :

- PETA RBI
- DATA BASE INDONE SIA



JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2017

KELURAHAN SANUA

Tabel 4.3 kondisi Penduduk menurut Kategori di Kelurahan Sanua Tahun 2017

No	Kategori Penduduk	Jumlah
1.	Kepala Keluarga	917 KK
2.	Kepala Rumah Tangga	799 KRT
3.	Laki-laki	1882 Jiwa
4.	Perempuan	1878 Jiwa
5.	Penduduk Dewasa	1610 Jiwa
	Total	3760 Jiwa

a Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)

3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya

a. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi kelurahan Sanua beragam seperti layaknya kelurahan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh beragamnya mata pencaharian masyarakat kelurahan. Ada yang berkecimpung di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan, pertambangan, kehutanan, konstruksi bangunan, pegawai pemerintahan, jasa, dan lain-lain. Adapun jenis mata pencaharian masyarakat kelurahan Sanua dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Sanua Tahun 2017

No	Bidang Pekerjaan	Jumlah (Org)
1.	Pertanian	-
2.	Perkebunan	-
3.	Perikanan	-
4.	Perindustrian	13
5.	Konstruksi Bangunan	1
6.	Perdagangan/Jasa	666
7.	Pegawai Pemerintahan	115
Total		799

Sumber: RPLP Kelurahan Sanua Tahun 2017

b. Kondisi Sosial Budaya

Beragamnya mata pencaharian menyebabkan beragamnya jumlah pendapatan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan dua kategori Strata dalam kondisi sosial masyarakat di kelurahan Sanua yakni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Non MBR. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5 Kondisi Sosial Di Kelurahan Sanua Tahun 2017

No	Kondisi Sosial	Jumlah (KK)
1.	MBR	532
2.	Non MBR	267
Jumlah		799

Sumber : RPLP Kelurahan Sanua Tahun 2017

Layaknya kondisi sosial, kondisi budaya di kelurahan Sanua juga bervariasi yang diwarnai oleh berbagai suku. Tidak hanya suku

pribumi, suku pendatang pun banyak yang berdomisili dan menetap di kelurahan Sanua.

Tabel 4.6 Suku dan Budaya Di Kelurahan Sanua Tahun 2017

No	Suku/Budaya	Jumlah (%)
1.	Muna	50
2.	Tolaki	5
3.	Bugis	15
4.	Buton	5
5.	Makassar	10
6.	Jawa	3
7.	Sumatra	2
8.	Betawi	1
9.	Lainnya	9

Sumber: RPLP Kelurahan Sanua Tahun 2017

4. Kondisi Fisik Dasar

Kondisi fisik dasar meliputi kemiringan tanah (topografi), jenis tanah (geologi) serta kondisi hidrologi (air, sungai serta curah hujan). Kemiringan tanah tertinggi mencapai 75 derajat. Jenis tanahnya bervariasi dari aluvial, laterik dan liat. Air yang tersedia berupa air sungai yang bersumber dari mata air pegunungan dan air laut. Intensitas curah hujannya 65mm/thn.

a. Kondisi Penggunaan Lahan

Tidak ada potensi dan permasalahan terkait tata guna lahan yang mempengaruhi penanganan kawasan kumuh di kelurahan Sanua. Hal ini dikarenakan oleh daerah konservasi yang ada di kelurahan Sanua hanya berupa Tahura Nipa-Nipa. Tahura tersebut tidak berpotensi mengancam penanganan kumuh karena tidak ada warga yang bermukim di Tahura tersebut. Tidak ada area budi daya di kelurahan Sanua.

Berikut penyajian tabel kondisi fungsi lahan yang ada di kelurahan Sanua :

Tabel 4.7 Penggunaan Lahan Di Kelurahan Sanua Tahun 2017

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
1.	Kawasan Kelurahan	163 Ha
2.	Permukiman	30,1 Ha
3.	Pertanian/Perkebunan/Pertambangan	0,125 Ha
4.	Industri/Perdagangan	0,075 Ha
5.	Ruang Terbuka Hijau	0,3 Ha
6.	Lahan Lainnya	12,7 Ha

Sumber : RPLP Kelurahan Sanua Tahun 2017

b. Kondisi Fisik Bangunan

Kondisi fisik bangunan yang ada di kelurahan Sanua bervariasi berdasarkan kondisi atap, lantai dan dinding serta kelayakan huniannya. Bangunan dikatakan layak huni jika melebihi 7,2 m² per hektar. Tingkat kepadatan bangunan rata-rata di kelurahan Sanua mencapai 27 unit per hektar. Kondisi fisik bangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Kondisi Fisik Bangunan Di Kelurahan Sanua Tahun 2017

No	Kondisi Fisik Bangunan	Jumlah (Unit)
1.	Jumlah Bangunan hunian memiliki luas lantai $\geq 7,2$ m ² per orang (Unit rumah tangga) 625	625
2.	Jumlah Bangunan hunian memiliki luas lantai $\leq 7,2$ m ² per orang (Unit rumah tangga)	174
3.	Jumlah Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis (Unit rumah tangga)	634
4.	Jumlah Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding tidak sesuai persyaratan teknis (Unit rumah tangga)	164

Sumber: RPLP Kelurahan Sanua Tahun 2017

c. Kondisi Jaringan Jalan

Jalan merupakan infrastruktur dasar yang wajib disediakan guna meningkatkan akses mobilitas masyarakat kelurahan. Kualitas jalan yang baik bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kondisi jalan di kelurahan Sanua bisa belum memenuhi persyaratan teknis karena hampir di seluruh wilayah

mengalami permasalahan jalan lingkungan. Seperti halnya di daerah dataran tinggi yakni di RT 2, 3, dan 5 yang belum memenuhi syarat kelayakan karena lebarnya kurang dari 1,5 meter dan dalam kondisi perkerasan namun rusak.

Tabel 4.9 Kondisi Jaringan Jalan Di Kelurahan Sanua Tahun 2017

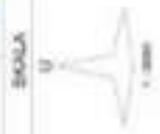
No	Lokasi	Panjang Jaringan Jalan Lingkungan (Meter)	Lebar Jalan Lingkungan dengan Lebar >1,5 meter
1.	RW 1	2.342	813
2.	RW 2	1.494	928
3.	RW 3	492	0
4.	RW 4	914	630
5.	RW 5	945	446
6.	RW 6	881	785

Sumber: RPLP Kelurahan Sanua Tahun 2017



KOTA TAWAR SUMER
PETA JALAN
KELURAHAN BANGS
KECAMATAN SENDANG BARAT
KETERANGAN

- LEGENDA
- RT
 - RT



d. Kodisi Jaringan Drainase

Drainase merupakan lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Fungsi utama drainase adalah untuk mengalirkan air. Pada umumnya perencanaan drainase perkotaan menganut system konvensional yakni membuang air genangan secepat-cepatnya ke sungai tanpa sebelumnya diresapkan ke dalam tanah. Demikian halnya di kelurahan Sanua. Dewasa ini di kelurahan Sanua saluran drainasinya banyak mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi dengan baik. Selain itu juga masih ada lokasi yang belum mempunyai saluran drainase. Kedua kondisi ini menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan normal sehingga menimbulkan banjir.

Tabel 4.10 Kondisi Jaringan Drainase di Kelurahan Sanua Tahun 2017

No	Lokasi	Panjang Jaringan Jalan Lingkungan (Meter)	Lebar Jalan Lingkungan dengan Lebar >1,5 meter
1.	RW 1	1.621	1.076
2.	RW 2	511	165
3.	RW 3	520	0
4.	RW 4	1.703	181
5.	RW 5	1.058	105
6.	RW 6	398	250

Sumber: RPLP Kelurahan Sanua Tahun 2017

e. Kondisi Persampahan

Sampah merupakan salah satu dari 7 indikator kumuh.

Sampah merupakan produk yang dihasilkan oleh masyarakat sebagai output dari aktivitas rutin masyarakat sehari hari. Dampak negatif sampah yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat Kelurahan Sanua adalah masalah bau dan penyakit yang ditimbulkan akibat sampah yang berserakan. Kurangnya kesadaran warga masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan memicu timbulnya permasalahan persampahan. Masyarakat enggan membuang sampah pada tempatnya meski sudah disediakan TPS.

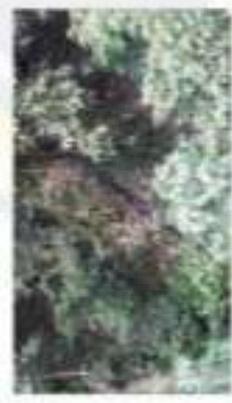
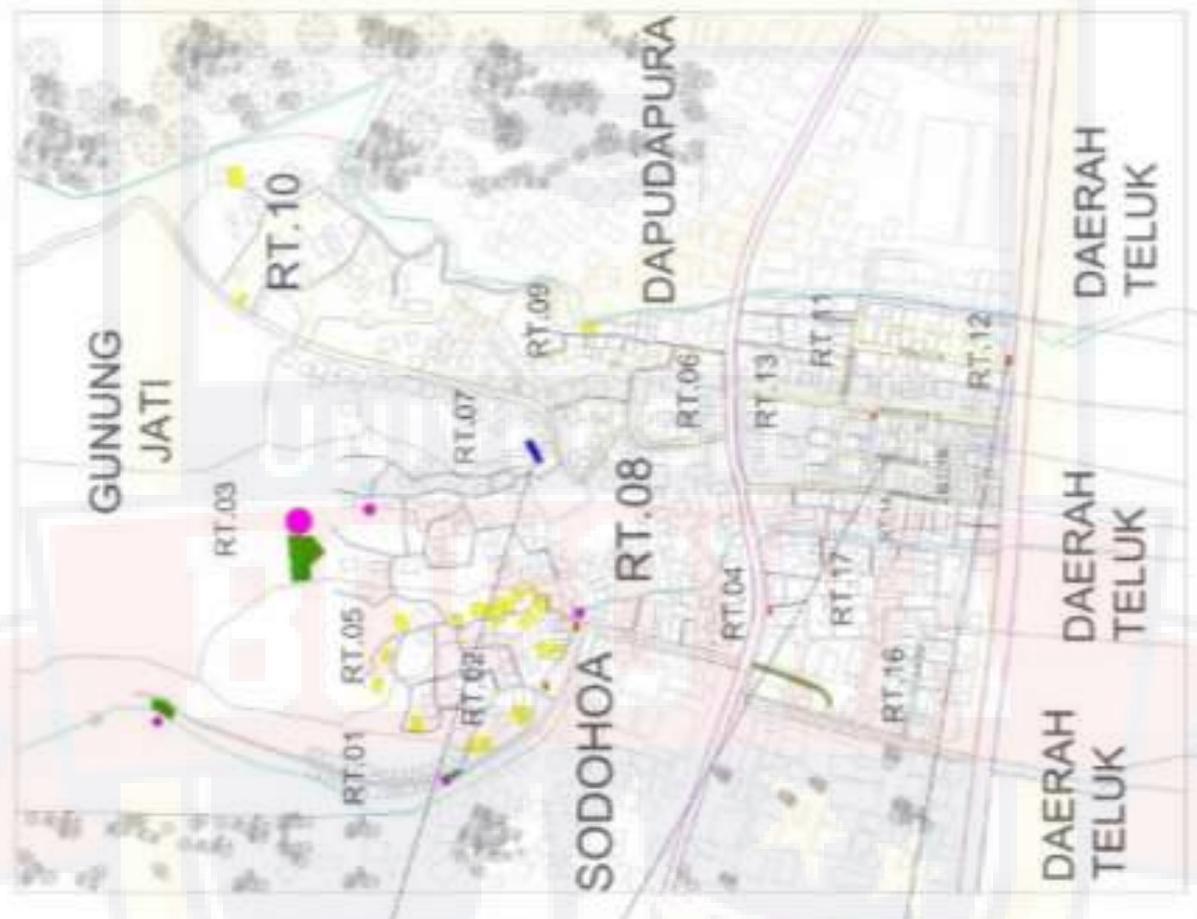
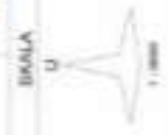
Tabel 4.11 Tempat Persampahan Di Kelurahan Sanua Tahun 2017

No	Lokasi	Jumlah Tempat Sampah Rumah Tangga
1.	RW 1	132
2.	RW 2	5
3.	RW 3	31
4.	RW 4	15
5.	RW 5	9
6.	RW 6	10

Sumber: RPLP Kelurahan Sanua Tahun 2017

LEGENDA

	Batas RT
	Batas Kelurahan
	Perumahan



DAERAH TELUK
 DAERAH TELUK
 DAERAH TELUK

Pelayanan air minum di kelurahan Sanua merupakan salah satu masalah yang harus segera ditangani mengingat penting air sebagai kebutuhan primer manusia. Sumber air di kelurahan Sanua cukup tersedia karena ada potensi sumber air dari pegunungan yang berupa mata air. Cara mengaksesnya pun harus menggunakan pipa yang berkilo kilo meter panjangnya. Namun saat ini sumber mata air itu sebagian besar dikelola oleh sekelompok orang dan menjadikan air minum sebagai bahan komersil. Banyak masyarakat kurang mampu di kelurahan sanua yang mengeluh kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang bisa dikonsumsi sebagai air minum dikarenakan iuran perbulannya terlalu mahal yakni mencapai Rp. 100.000,- per bulannya. Kondisi ini terjadi di RT 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan di RT lainnya sebagian masih menggunakan Air PDAM dan sebagian lagi menggunakan sumur bor yang belum layak dijadikan sebagai air minum hanya terbatas pada mandi, cuci dan kakus saja.

LEGENDA

- Blok RT
- Blok Kelurahan
- Ruang Terbuka Hijau
- Blok Bangunan
- Tanah Liris
- Jalan RT/ RW
- Jalan Perkotaan
- Perumahan Kawasan Perkotaan
- Blok Pemukiman



Pada sub bab ini, peneliti akan menguraikan data dari hasil wawancara dengan narasumber. Penulis akan menerapkan hasil penelitian tentang Implementasi Programm KOTAKU dalam Pembangunan Infrastruktur berbasis masyarakat di kelurahan Sanua. Secara deskriptif kualitatif berdasarkan kajian pustaka dan wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa narasumber. Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Januari 2018 dan 20 Januari 2018, yang bertempat di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. Penelitian ini dilakukan atas dasar tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program KOTAKU dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Seperti yang penulis uraikan dibawah ini:

1. Identitas Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini merupakan informan yang menjadi objek penelitian langsung sehingga memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Narasumber yang diwawancarai adalah:

- Narasumber 1 bernama Ibu Afrianti.ST, menjabat sebagai Satuan Kerja (Satker KOTAKU)
- Narasumber 2 bernama Ibu Andryani Endang, menjabat sebagai Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) (Masyarakat)

- Narasumber 3 bernama Bapak Silondae.S.Sos, menjabat sebagai Kepala Kelurahan Sanua
- Narasumber 4 bernama Ibu Mazida, menjabat sebagai Bendahara BKM (Masyarakat)
- Narasumber 5 bernama Bapak Donald Douglas, SE, menjabat sebagai Wakil Ketua BKM (Masyarakat)
- Narasumber 6 bernama Bapak M.Nasir, menjabat sebagai Sekretaris BKM (Masyarakat)
- Narasumber 7 bernama Bapak Hasirudin, menjabat sebagai Ketua RT 1 (Tokoh Masyarakat Kelurahan Sanua)
- Narasumber 8 bernama Ibu Zubaida M, sebagai masyarakat Kelurahan Sanua
- Narasumber 9 bernama Bapak Hamka, sebagai masyarakat Kelurahan Sanua

E. Temuan Penelitian

1. Tahap Persiapan

a. Sosialisasi kepada Masyarakat setempat

Peran serta masyarakat sangat tergantung pada kesediaan informasi yang disalurkan ke atas atau ke bawah, informasi yang disalurkan ke atas, umumnya berupa masukan bagi atasan untuk memperbaiki, menyempurnakan dan atau membuat keputusan baru; sedangkan informasi yang disalurkan di bawah umumnya berupa penjelasan tentang tugas/program, kebijaksanaan, peraturan dan sejenisnya (sosialisasi penanganan kumuh di Kelurahan Sanua).

Tujuan diselenggarakannya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan program KOTAKU adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah, pelaksanaan kegiatan maupun pemeliharaan infrastruktur. Sosialisasi di Kelurahan Sanua di lakukan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yaitu ibu Andryani Endang dan anggotanya dilaksanakan di sekretariat BKM atau di aula Kelurahan Sanua.

Adapun materi yang diberikan kepada masyarakat terkait mengenai penanganan kumuh seperti yang dijelaskan informan 1 berikut:

“Materi sosialisasi yang diberikan yaitu terkait dengan program KOTAKU yang bertujuan untuk merubah permukiman yang kumuh menjadi layak huni, dan teknis pelaksanaan program yang melalui dengan 4 tahap yaitu,

*persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Serta program yang berkaitan tentang pentingnya partisipasi masyarakat yang sangat bermanfaat bagi mereka”.*¹

Selain itu, informan 1 juga menyatakan tentang partisipasi masyarakat dalam tahap sosialisasi yang dilakukan dikelurahan sanua, bawah:

*“Adapun partisipasi masyarakat Kelurahan Sanua dilihat dari tingkat kehadiran kurang lebih 60 orang. Masyarakat antusias untuk melaksanakan program KOTAKU di lingkungannya dan siap mendukung atau berpartisipasi. Dalam pelatihan ini disepakati nama-nama yang akan menjadi pengurus BKM : Andryani Endang (Ketua BKM), Donald Douglas, SE (Wakil ketua BKM), M.Nasir (Sekertaris), Mazida (Bendahara), M.Zainuddin (Anggota), M. Tamrin,SE (Anggota), Andi Reni (Anggota), DRS.Nasrun (anggota), Annisa La Amba, S.sos (Anggota)”.*¹

Selain itu kaum ibu-ibu dari sebagian masyarakat menyepakati untuk berpartisipasi berupa kesediaanya untuk menyiapkan konsumsi ketika musyawarah dan pelaksanaan kegiatan fisik berupa pembangunan infrastruktur.

Selain itu informan 2 menjelaskan bentuk keterlibatan kaum perempuan dalam tahap sosialisasi, ia mengatakan bahwa:

*“Ibu-ibu warga sini saat ada musyawarah kelurahan atau lagi saat kegiatan pembangunan fisik dilksanakan, menyediakan miumann makanan, seperti kopi, teh atau es kalau cuacanya lagi panas, bukan Cuma minuman, makannya juga dibuatkan seperti gorengan, kue atau tidak kita masak nanti makan bersama kalau sudah masuk makan siang”.*²

Tugas tersebut disepakati dan didanai swadaya oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan dan program KOTAKU hanya boleh digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang direncanakan oleh masyarakat, adapun untuk pengeluaran lainnya adalah swadaya masyarakat setempat dimana program akan diimplementasikan.

2. Musyawarah I

Tujuan dari musyawarah kelurahan untuk melakukan identifikasi kelembagaan masyarakat dan keaktifan BKM yang terdapat di masyarakat serta pembahasan hasil sosialisasi pada warga masyarakat yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Hasil dari sosialisasi adalah menetapkan BKM pelaksanaan kegiatan KOTAKU di Kelurahan Sanua. Menetapkan para pengurus dengan ketentuan 80% pengurus BKM adalah masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut kemudian di dampingi oleh ketua BKM untuk membahas kosep surat pernyataan minat dan kesiapan masyarakat dalam pelaksanaan KOTAKU.

Sebagaimana yang diungkapkan informan 1 sebagai berikut:

“Anggota dari pengurus BKM harus banyak dari masyarakatnya sendiri, biar masyarakatnya aktif dalam kegiatan pemerintah bukan Cuma menerima saja apa yang dikasih tapi bisa juga dipertanggung jawabkan dan melaksanakan”.¹

Oleh karena itu pelaksanaan program KOTAKU lebih banyak melibatkan masyarakat itu sendiri. Adapun surat pernyataan yang membuat kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program KOTAKU dan berperan aktif dalam setiap tahap kegiatan, kemudian masyarakat siap menerima BLM untuk perbaikan lingkungan dan sanggup melaksanakan sesuai dengan pedoman umum KOTAKU.

b. Tahap Perencanaan

1. Musyawarah Kelurahan II

Musyawarah Kelurahan II dilaksanakan untuk melibatkan ibu-ibu atau kaum perempuan yang berada pada daerah tersebut untuk mengusulkan bagaimana teknis pembangunan infrastruktur sehingga tidak mengganggu kegiatan ibu-ibu sehari-hari. Tidak hanya kaum wanita yang ikut dalam musyawarah kelurahan II ada juga masyarakat dan anggota BKM yang aktif melakukan kegiatan yang dilakukan di aula kelurahan.

Bentuk keterlibatan kaum perempuan sangat penting dalam pelaksanaan muskel I seperti yang dijelaskan informan 5 dan 2 sebagai berikut:

“Campur tangan ibu-ibu sangat penting, misalnya seperti kalau kita mau bangun siring yang disibukan perempuan saat ibu-ibu lagi mencuci terus siringnya dibubarkan nanti kerjaan rumah tangganya tidak beres-beres akibat dari adanya pembangunan siring, makanya dibuat kesepakatan jadwal sama ibu-ibu warga sanua, agar tidak

menghambat pekerjaannya, dan itulah pentingnya partisipasi kaum perempuan saat musyawarah dan ajuan usul”.⁵

“Partisipasi kaum perempuan dalam tahap perencanaan dilihat dari tingkat kehadiran, berkisar 20 orang. Masyarakat yang aktif bertanya maupun mengungkapkan pendapat. Seperti pengusulan dibangunnya sumur bor di RT 1 karena tidak adanya sarana air bersih, kemudian mengusulkan pembangunan drainase di RT 2 karena drainasenya sudah sangat rusak parah bahkan sudah tidak berbentuk seperti drainase lagi, kemudiann pendapat lainya yang dilontarkan kaum perempuan”.²

Kemudian hasil dari pendapat kaum perempuan terkait komponen infrastruktur yang akan dibangun dimusyawarakan pada muskel ke II yang dilaksanakan di sekretariat BKM di Kelurahan Sanua, dipimpin oleh Bapak Silondae.S.Sos sebagai Kepala Kelurahan Sanua di dampingi oleh anggota BKM.

Tujuan dari muskel II seperti yang dijelaskan informan 2 sebagai berikut:

“Muskel II dilaksanakan untuk membahas hasil yang telah dimusyawarakan bersama dengan kaum perempuan misalnya kaya dibangunnya drainase di RT 2 dan RT 17 selanjutnya usul dibangunnya sumur bor di RT 1 dan usulan-usulan lainnya, ketika dimuskel II dibahas apa saja yang masih kurang, misalnya dibangun rabat beton atau MCK di RT-RT yang kurang ketersediaanya. Masyarakat sangat antusias sekali menyampaikan usulan-usulan”.²

Konstruksi yang boleh di usulkan dalam musyawarah kelurahan II dalam pembangunan infrastruktur suda ada ketentuannya dalam program KOTAKU, tetapi sebisa mungkin program yang dibangun dilakukan oleh masyarakat sendiri sehingga

meminimalisir peran pihak ketiga (kontraktor). Sebagaimana pernyataan berikut.

*“Infrastruktur yang bisa diusulkan melalui program KOTAKU suda ada ketentunnya, itu suda ada kesepakatan dari pemerintah, kalau mau ada usul pembangunan yang lebihh besar juga bisa tetapi yang mengerjakan bukan masyarakat, ada tim ahli yang akan mengerjakan. Contohnya seperti pembangunan sumur bor, tidak semua orang bisa, jadi mengenai pembangunannya di serahkan kepada pihak ketiga”.*²

2. musyawarah kelurahan III

Agenda musyawarah ke III membahas kesepakatan rencana prioritas tahunan infratraktur yang akan dibangun. Penyepakatan jadwal penyusunan RKM (Rencana Kerja Masyarakat) dan pembentukan KPP (Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan).

Penjelasan tentang muskel III oleh Inforaman 2 dan 9 sebagai berikut:

*“Muskel III dilaksanakan di aula Kelurahan Sanua yang dihadiri masyarakat berkisar 50 orang, 35% perempuan dan 65% laki-laki, masyarakat tersebut terdiri dari ketua RT, tokoh adat atau masyarakat, kaum perempuan yang ikut dalam muskel II dalam memberikan usul-usulan, serta masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh dimana program akan diimplementasikan”.*⁹

*“Rencana kerja masyarakat dibuat berdasarkan hasil dari muskel II pada dokumen program KOTAKU, di dalam dokumen RKM memuat rencana penggunaan dana BLM dari KOTAKU. Kemudian masyarakat merujuk orang-orang siapa saja penanggung jawab dari KPP, setiap pemangunan ada penanggung jawabnya sendiri dia yang memelihara prasarana tersebut dan seterusnya”.*²

Dalam muskel III ini juga mulai disusunnya anggaran dana yang ingin dikeluarkan pemerintah dalam pembangunan apa yang akan dibangun sesuai dengan usulan yang sudah diberikan oleh masyarakat. Anggaran dana dalam pembangunan infrastruktur yang akan dibangun keluar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pembangunan, sehingga semua anggaran dana jelas untuk pembangunan apa saja dan berapa nominal yang akan digunakan saat pelaksanaan berlangsung.

Penggunaan anggaran program yang dijelaskan informan 5 Seperti pernyataan berikut.

*“Jadi setiap apa saja infrastruktur yang mau dibangun dana keluar dari pemerintah, misalnya ada pembangunan rabat beton kira-kira dana yang dikeluarkan pemerintah dalam pembangunan itu sekitar Rp. 200.000.000 atau pembuatan sumur bor yang memakan dana Rp. 150.000.000 dan begitu seterusnya sesuai dengan infrastruktur apa yang akan dibangun kemudian dana dikeluarkan oleh pemerintah”.*⁴

c. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik

1. musyawarah Kelurahan IV

Membahas langka-langka yang akan dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik. Muskel IV dilaksanakan di aula Kelurahan Sanua. Hal-hal yang harus dibahas adalah penetapan tenaga kerja, rencana pengadaan barang, pembersihan lokal pembentukan tim pengadaan barang dan jasa, dll. Tim pengadaan barang dan jasa di Kelurahan Sanua di ketahuai oleh

bapak Silondae.S.Sos, sedangkan tenaga kerja diambil dari dimana mereka tinggal atau di RT masing-masing. Sebagai mana ungkapan berikut.

Menurut informan 7 dalam pelaksanaan nantinya harus ada tukang yang mampu dalam bidang yang dibutuhkan dalam pengerjaan tersebut, seperti berikut:

*“Tempat mereka kerja itu ya di Rtnya masing-masing, karena kita kan maunya begimana caranya supaya masyarakat langsung yang melakukan kegiatan pembangunan tapi di sediakan juga tukang khususnya, karena kalau tidak ada tukang khususnya masyarakat setempat tidak tau ukuranya dan bisa jadi berantakan pembangunannya”.*⁷

Penjelasan lebih lanjut juga dijelaskan oleh informan 3 sekalaku ketua Lurah, sebagai berikut :

*“Barang itu sudah disediakan sama pemerintah apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan yang akan dibuat, diusahakan barang sudah datang tepat waktu jadi langsung dikerjakan saja apa yang harus dikerjakan karena ketersediaan barannya sudah ada”.*³

Dan ungkapan jumlah oarang yang hadir dalam musyawarah kelurahan IV yang dijelaskan oleh informan 1 selaku ketua BKM:

*“Dalam musyawarah kelurahan IV jumlah masyarakat yang hadir kira-kira sekitar 60 orang, 20 orang kaum perempuan dan 40 orang laki-laki. Pekerjaan yang paling aktif ada sekitar 30 oarang dari keseluruhan orang yang datang saat musyawarah, baik yang aktif dalam musyawarah mau pun aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian kegiatan pembersihan lokasi dilakukan secara bergotong royong atau sukarela didampingi oleh BKM, menyadarkan masyarakat untuk kebaikan kampungnya sendiri”.*²

2. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di wilayah kumuh Kelurahan Sanua sesuai dengan Rencana Kerja Masyarakat yang disusun pada tahun 2015. Kegiatan fisik yang di kerjakan oleh masyarakat setempat didampingi oleh para ahli agar hasil sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun para tukang tersebut adalah warga asli Kelurahan Sanua tetapi mereka tetap diberikan bayaran. Alasannya karena mereka adalah masyarakat yang kurang mampu sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas dan memiliki keluarga yang harus dinafkahi, selain itu agar dana BLM benar-benar diserap oleh masyarakat miskin itu sendiri. Masyarakat itu yang membangun sendiri dan untuk dirasakan manfaatnya oleh mereka sendiri.

Adapun menurut data yang ada, jumlah pekerja aktif terdapat 25 orang. Terdapat dari masyarakat kurang mampu sekitar lingkungan kumuh Kelurahan Sanua. Sedangkan total pekerjaan adalah 65 orang. Selama pelaksanaan kegiatan fisik masyarakat didampingi oleh ketua BKM yaitu Ibu Andryani Endang berikut adalah keaktifan masyarakat dan kaum perempuan dalam melaksanakan program KOTAKU serta dalam kegiatan pengawasan dalam proses pekerjaan fisik.

Bentuk partisipasi kaum perempuan bukan saja dalam menyiapkan makanan tetapi mampu membantu secara langsung dilapangan seperti yang diucapka informan 8, sebagai berikut:

*“Ibu-ibu yang ada disana sampe bantu angkat-angkat material bangunan karena terlalu semangat partisipasinya untuk ikut juga membangun infrastruktur yang lagi dibangun”.*⁸

Hal tersebut menurut pengakuan mereka karena demi kebaikan kampung sendiri, jika kalau bukan dari kita sendiri yang mau berubah keadaan kampung kita jadi lebih baik, lalu siapa lagi yang akan bekerja memperbaiki kampung kita.

Kata informan 9 bahawa yang akan membangun kampung kita adalah masyarakat itu sendiri:

*“Kita ini adalah relawan, istilah relawan disini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat, untuk kemajuan kampung sendiri. Bukan untuk pribadi sendiri, kalau kita tidak sukarela terus mau siapa lagi yang mau memajukan kampung sendiri, namanya juga relawan jadi kalau ada waktu dia yang kesana, jadi bergantian. Karena kan tidak semata-mata di wilayah itu saja, dimana saja wilayah kumuh Sanua kita tetap membantu”.*⁹

Berdasarkan pernyataan diatas, partisipasi perempuan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan fisik terkadang mengerjakan pekerjaan berat yang maupun laki-laki atau pun perempuan juga bisa melakukannya, sedangkan dalam kegiatan pengawasannya selama mereka ada dirumah atau ada di lingkungannya maka mereka akan melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan secara sekarela, sehingga tidak mengganggu aktifitas mereka di luar lingkungan.

d. Tahap Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah meningkatkan mutu program, memberikan justifikasi atau penggunaan sumber-sumber yang ada dalam kegiatan, memberikan kepuasan dalam pekerjaan dan menelaah setiap hasil yang telah direncanakan.

Evaluasi dilaksanakan secara terbuka, setiap masyarakat boleh mengadiri ketika didalam rapat evaluasi. Selain itu juga semakin sering masyarakat ikut serta dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan maka itu lebih baik. Tetapi khusus bagi BKM diharuskan untuk membantu dan mengevaluasi kegiatan. Sebagai laporan pertanggung jawaban.

Didalam pengawasan siapa boleh mengawasi tapi lebih ditekankan untuk BKM dan RT untuk hal itu menurut informan 1 :

*“Masyarakat boleh saja mengawasi tapi sangat di khususkan untuk BKM karena yang tau persis pembangunannya, kalau masyarakat mau setiap haripun mengawasinya bole saja malah lebihh bagus lagi. Dan RT setempat yang sangat diwajibkan dalam pengawasan. Kalau seumpama hasilnya tidak bagus kan RT nya juga yang kena imbasnya. Selama ini RT dan BKM yang aktif mengawasi, masyarakat sekitar palingan Cuma liat-liat begitu saja. Kalau rapat evaluasi ada di muasyawarah kelurahan”.*¹

Berdasarkan pernyataan di atas, maka ketua RT diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan di RT

masing-masing. Masyarakat juga di persilahkan untuk mengawasi proses pelaksanaan kegiatan.

Pada tahap evaluasi selanjutnya dibahas dalam musyawarah kelurahan V yaitu membahas tentang pertanggung jawaban penggunaan dana BLM untuk pelaksanaan kegiatan fisik, pembahasan laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur, penyerahan seluruh dokumen dan laporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, persiapan serah terima hasil pembangunan pembentukan KPP (Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaatan).

Dijelaskan juga oleh informan 6, sebagai berikut:

*“Pada musyawarah muskel V penyelesaian serah terima dokumen pelaksanaan pembangunan fisik, ada yang bertanggung jawab untuk memberikan laporan saat melaksanakan berlangsung, terus juga langsung dibentuk siapa saja yang menjadi anggota KPP”.*⁶

Adapun tugas KPP adalah melakukan pemeliharaan infrastruktur. KPP dibentuk untuk megawasi infrastruktur yang telah selesai dibangun kemudian melapor jika terjadi kerusakan. Pengurus KPP berasal dari masyarakat setempat dan seluruh RT menjadi anggota sehingga pengawasan dilakukan bersama-sama.

F. Implementasi Program Kotaku Sebagai Pembangunan Berbasis Masyarakat dan Bentuk Keterlibatan Masyarakat

Implementasi program KOTAKU di Kelurahan Sanua melalui 4 tahap utama yaitu, persiapan yang dilakukan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat dan musyawarah kelurahan I, kemudian perencanaan yang dilakukan dengan musyawarah kelurahan II dan musyawarah kelurahan III, tahap pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan musyawarah kelurahan IV, yang langsung dilaksanakannya pembangunan fisik, dan yang terakhir adalah evaluasi yang sekaligus pengawasan di dalamnya dan dilanjutkan pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan. Tahap-tapat tersebut telah diimplementasikan pada tahun 2015.

Dalam bab II (h.37) strategi pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat bersifat sangat struktural yang dapat mengakomodasi berbagai ragamkonsektual masing-masing daerah, lebih dapat mengakomodasi berbagai ragam konsektual masing-masing daerah, lebih dapat mempermudah penjabaran yang sistematis pada tingkat yang lebih operasional oleh para pelaku pembangunan di bidang infrastruktur, baik dalam bentuk rencana, program, proyek maupun kegiatan.

Sanua merupakan Kelurahan Kota Kendari yang memiliki luas daerah 163Ha, memiliki 6 RW dan 17 RT didalamnya, yang sebagian

besar penduduknya beragama islam, sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai serta prasarana jaringan jalan yang masih terbilang kumuh sekarang sudah menjadi permukiman yang layak huni dan pembangunan jalan yang sudah tertata rapih dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.

1. Tahap Persiapan

Persiapan pada pelaksanaan program KOTAKU diawali dengan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat daerah tersebut yaitu, tentang pengertian kumuh dan program yang akan diimplementasikan, pelatihan merupakan suatu proses pembelajaran yang melibatkan prolehan keahlian konsep peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Sosialisasi yang suda dilaksanakan merupakan usaha untuk memperbaiki performasi kerja yang menjadi tanggung jawab masyarakat dan anggota BKM yang sudah dibentuk dan dipilih oleh masyarakat sekitar, sosialisasi ini diharapkan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dari keahlian SDM (Sumber daya Manusia) organisasi yang berkaitan dengan fungsi yang harus dipertanggung jawabkan.

Kegiatan sosialisasi dalam implementasi program KOTAKU sebagai model pembangunan berbasis masyarakat sangat diminati pelaksanaannya oleh warga sekitar karena manfaatnya sangat

besar untuk daerah tersebut, masyarakat antusias datang pada tahap pelatihan yang dilihat dari pernyataan bab IV (h.89) dilihat dari tingkat kehadiran kurang lebih 60 orang masyarakat antusias untuk melaksanakan program KOTAKU di lingkungannya dan siap berpartisipasi secara aktif.

Kemudian pada tahap persiapan seluruh masyarakat yang ikut pada musyarah kelurahan I menentukan dan mengusulkan tugas-tugas apa saja yang akan dilakukan masyarakat serta anggota BKM dalam mengimplementasikan program KOTAKU.

Tujuan dilaksanakan sosialisasi telah dirancang dengan baik oleh anggota BKM, tentang apa yang ingin di capai setelah pelatihan ini dilakukan dengan memberikan materi-materi yang berkaitan dengan program KOTAKU dan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat serta melakukan identifikasi kelembagaan masyarakat, dan keaktifan masyarakat yang ikut berpartisipasi.

2. tahap Perencanaan

Wacana pembangunan yang berbasis masyarakat sesungguhnya suda dimulai 34 tahun yang lalu, dimana konsep pembangunan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat telah dimasukan dalam GBHN pada decade 1970an. Sementara kebijakan yang lebih konkrit dimulai pada decade 1980an, sejak decade 1990an, kegiatan pembangunan daerah dirancang lebih

pertisipatif melalui lembaga pengambilan keputusan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

Pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan sangat perlu dalam pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Seperti pertanyaan pada bab II (h.37) pembangunan masyarakat adalah salah satu gerakan untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat dengan melibatkan peran serta nyata dari mereka. Dengan adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat dan kegiatan tersebut mempunyai tujuan yaitu, mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik jika dibanding dengan keadaan sebelumnya, kegiatan tersebut diperlukan peran nyata dari seluruh anggota masyarakat.

Dengan menentukan apa saja pembangunan infrastruktur yang boleh diusulkan masyarakat yang sudah menjadi ketentuan pemerintah. Ibu-ibu ikut serta mengusulkan jadwal pelaksanaan, karena agar tidak menghambat pekerjaan sehari-hari ibu-ibu yang tempat tinggalnya berada pada wilayah yang akan dibangun infrastrukturnya. Perencanaan yang melibatkan masyarakat di dalamnya untuk membicarakan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya merupakan suatu hal yang sangat baik dibutuhkan dalam implementasi program KOTAKU sebagai

model pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, karena jika masyarakat memahami apa yang sudah menjadi hak dan kewajiban mereka dalam program KOTAKU yang akan dilaksanakan nantinya pasti realisasi dalam pembangunan infrastruktur akan berjalan secara maksimal.

Hal ini merupakan sesuatu yang sangat menguntungkan bagi perwujudan implementasi program KOTAKU karena, implmentasi atau pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat bergerak salah satunya ialah dengan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka. Masyarakat Kelurahan Sanua telah memahami dan menyadari dengan baik akan pentingnya keterlibatan mereka dalam suatu program pembangunan, partisipasi masyarakat sudah terwujud dengan baik dilihat dari masyarakat yang secara aktif memberikan usulan-usulan, membantu menyiapkan dan merencanakan penyusunan jadwal Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

3. Tahap Pelaksanaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa hal seluruh masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam membuat kebijakan dalam perencanaan, tetapi bagaimana dalam membuat perencanaan yang sifatnya untuk kepentingan publik sudah

seharusnya pemerintah melibatkan warga masyarakat dalam proses pembangunan yang berbasis masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat secara nyata dan positif terhadap penyusunan rencana dan implementasi pembangunan di daerahnya.

Masyarakat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah, potensi dan kegiatan masyarakat.

Perlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diawali oleh adanya sosialisasi yang optimal dari pihak-pihak yang bertanggung jawab (anggota BKM) tentang pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Sanua sudah cukup baik, dimana masyarakat setempat dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan pembangunan terealisasi maksimal karena dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti pernyataan bab IV (h.95). Kegiatan fisik yang dikerjakan oleh masyarakat setempat didampingi oleh para ahli agar sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun para tukang tersebut adalah warga asli Kelurahan Sanua tetapi mereka tetap diberi bayaran. Dikarenakan mereka masyarakat yang kurang mampu, sehari-hari berkerja sebagai buruh harian

lepas dan memiliki keluarga yang harus dinafkai, selain itu, agar dana BLM benar-benar diserap oleh masyarakat miskin itu sendiri.

Masyarakat yang membangun sendiri dan untuk dirasakan manfaatnya oleh mereka sendiri.

Pengawasan pekerjaan dilakukan semua masyarakat Kelurahan Sanua tidak hanya anggota BKMnya saja, dengan melibatkan seperti itu semangat akan pembangunan dapat memakai proses pembangunan itu sendiri sebagai konsekuensi adanya kebersamaan dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat sudah terwujud dengan baik dilihat dari apa yang diinginkan masyarakat dalam pembangunan daerahnya sudah terealisasi dengan penerapan pembangunan pada prinsip-prinsip dasar pembangunan berbasis masyarakat yaitu, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

Perlunya melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, mendengar aspirasi atau usulan-usulan masyarakat, kepada pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dan memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial dalam masyarakat.

4. Tahap Evaluasi

Perlibatan evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah yang sudah direncanakan sebelumnya,

perlibatan masyarakat dalam evaluasi merupakan suatu tujuan untuk mengetahui tercapainya suatu program yang telah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya.

Suatu proses dalam menyediakan informasi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut tercapai. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa beberapa hal seluruh warga masyarakat tidak mungkin dilibatkan dalam mengevaluasi suatu pelaksanaan pembangunan, tetapi juga dalam hal mengawasi suatu pembangunan yang sedang dilaksanakan, dan sifatnya untuk kepentingan publik sudah sepantasnya pemerintah melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi dan mengawasi pembangunan.

Dalam hal ini perlu adanya suatu perlibatan kinerja dari aparat pemerintah guna meningkatkan kerja sama dengan baik dari seluruh elemen masyarakat. Seperti pernyataan pada bab IV (h.99) evaluasi dilakukan secara terbuka, setiap masyarakat boleh menghadiri ketika diadakan rapat evaluasi. Selain itu juga semakin seringnya masyarakat ikut serta dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan maka itu lebih baik. Tetapi khusus BKM dikhususkan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan. Sebagai laporan pertanggung jawaban.

Implementasi pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat merupakan suatu pembangunan dimuali dari persiapan,

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan evaluasi sampai tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk terlibat langsung didalamnya.

Maka pada tahap evaluasi pada suatu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakatm sehingga masyarakat tau ketercapaian apa saja yang sudah didapat dalam pelaksanaan pembangunan pada program KOTAKU.

G. Implementasi Program Kotaku Dalam Pembangunan Infrastruktur

1. Kriteria dan Indikator permasalahan permukiman Kumuh

Merupakan tahapan untuk menilai lokasi permukiman kumuh berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Penentuan kawasan permukiman kumuh dilakukan berdasarkan aspek dan kriteria sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
1.	Kondisi bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan 	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	5

			tampilan bangunan pada suatu zona; dan/ata <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok bangunan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 		
		Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTB • KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau • Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu : o Untuk kota metropolitan dan kota besar ≥ 250 unit/Ha o Untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 unit/Ha 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	5
				<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	3
				<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	1
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	5
				<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	3
			permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan 	3
				<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area tidak tersedia 	1

				drainase lingkungan	
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketidakterersediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 	5
				<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 	3
				<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 	1
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	5
				<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	3
				<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	1
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	<ul style="list-style-type: none"> 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	5
				<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	3
				<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% drainase 	1

				lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	
		Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik : <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan rutin ; dan/atau • Pemeliharaan berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 	5
				<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 	3
				<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 	1
		Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	5
				<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	3
				<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	1
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Tekni	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	5
				<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai 	3

				standar teknis	
6.	Persampahan	Pengelolaan Persampahan	perumahan atau permukiman, baik : <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan rutin; dan/atau • Pemeliharaan berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 	3
				<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 	1
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Pasokan air; • Jalan lingkungan; • Sarana komunikasi; • Data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan • Bangunan pos kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	5
				<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	3
				<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 	1

Keterangan: 76%-100% = Kategori Buruk (Nilai Indikator 5) 51%-75% = Kategori Sedang (Nilai Indikator 3) 25%-50% = Kategori Baik (Nilai 1)

2. Rencana Jalan Lingkungan

Perencanaan Jalan pada kawasan prioritas dengan menggunakan material beton yang biasa kita kenal dengan istilah jalan rabat beton. Jalan ini direncanakan dengan lebar minimal 1,5 meter. Pada lokasi tertentu yakni pada daerah yang konturnya berada pada daerah ketinggian desain jalan rabat ini dimodifikasi menjadi tangga rabat sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga ada sarana pendukung jalan yang akan dibangun di kawasan prioritas yakni talud pengaman jalan dan reling pengaman jalan. Talud pengaman jalan didesain untuk mengamankan jalan dari bahaya longsor. Reling pengaman jalan didesain untuk mengamankan para pejalan kaki agar tidak terjatuh.

Peningkatan Kualitas Jalan	Pembuatan Rabat Jalan	RT 02	55	Meter
		RT 03	350	Meter
	Tangga Rabat	RT 02	250	Meter
		RT 03	150	Meter
Sarana pendukung jalan	Talud pengaman Jalan	RT 02	200	Meter
	Relling	RT 02	300	Meter
		RT 03	200	Meter

3. Rencana Drainase Lingkungan

Rencana penanganan jaringan drainase di kawasan prioritas ini menjadi isu pokok yang harus segera diselesaikan mengingat

kerugian yang mungkin ditimbulkan, beberapa permasalahan yang timbul pada dasarnya disebabkan oleh berkurangnya kapasitas saluran karena buangan padat/sampah dan endapan sedimen/pasir. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam menangani masalah genangan di kawasan adalah sebagai berikut :

- a. Mengurangi aliran yang masuk ke area yang tergenang atau memperlambat aliran di hulu/atau mengalihkan aliran di hulu,
- b. Memperbanyak outlet dari area genangan,
- c. Mengurangi debit masuk ke saluran induk dan atau primer dengan membuat jaringan pipa induk/sekunder baru.

Untuk pengembangan system drainase di wilayah Prioritas diarahkan dengan pendekatan cathment area dimana pengaliran air dilakukan terhadap alur sungai terdekat yang merupakan daerah tangkapan airnya.

Pembuatan drainase	RT 02	32	Meter
	RT 03	30	Meter

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan

jaringan perpipaan. SPAM dengan jaringan perpipaan dapat meliputi : unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. SPAM bukan jaringan perpipaan dapat meliputi : sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air. Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Baku mutu air baku untuk air minum menurut PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Kualitas Pengendalian Pencemaran Air Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :

Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan , air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut;

Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi, pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Unit air baku dapat terdiri dari : • Bangunan pengambilan/ penyadapan, • Alat pengukuran dan peralatan pemantauan, • Sistem pemompaan, dan/atau • Bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya • Bangunan penampungan air (air baku)
Kebutuhan air bersih di kawasan prioritas menggunakan air yang bersumber dari mata air yang terdapat pada kawasan prioritas.

Untuk memenuhi kebutuhan

akan air bersih yang sehat untuk masyarakat di kawasan prioritas dilakukan rencana Pengadaan Perpipaan. Hal ini bertujuan memudahkan akses masyarakat akan kebutuhan air minum.

5. Rencana Pengelolaan Limba

Untuk jangka pendek (5 tahunan) berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dan kondisi eksisting yang ada, ternyata untuk pelayanan dan atau penyediaan sistem jaringan air limbah dirasakan cukup mendesak, dalam arti sistem pelayanan yang

dilakukan adalah pelayanan on site (pelayanan setempat). Namun demikian untuk kebutuhan jangka panjang perlu diinformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola air limbah, tata letak dan tata bangunan septic tank yang memenuhi persyaratan, utamanya untuk penduduk yang bertempat tinggal di sepanjang bantaran sungai perlu disediakan sarana MCK umum yang memenuhi syarat, sehingga untuk keperluan MCK mereka tidak langsung memanfaatkan sungai yang ada.

Sistem septic tank sebenarnya adalah sumur rembesan atau sumur kotoran. Septic tank merupakan sistem sanitasi yang terdiri dari pipa saluran dari kloset, bak penampungan kotoran cair dan padat, bak resapan, serta pipa pelepasan air bersih dan udara. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pembangunan septic tank agar tidak mencemari air dan tanah sekitarnya adalah :

1. Jarak minimal dari sumur air bersih sekurangnya 10 m.
2. Untuk membuang air keluaran dari septic tank perlu dibuat daerah resapan dengan lantai septic tank dibuat miring ke arah ruang lumpur.
3. Septic Tank direncanakan untuk pembuangan kotoran rumah tangga dengan jumlah air limbah antara 70-90 % dari volume penggunaan air bersih.

4. Waktu tinggal air limbah didalam tangki diperkirakan minimal 24 jam.
5. Besarnya ruang lumpur diperkirakan untuk dapat menampung lumpur yang dihasilkan setiap orang rata-rata 30-40 liter/orang/tahun dan waktu pengambilan lumpur diperhitungkan 2-4 tahun.
6. Pipa air masuk kedalam tangki hendaknya selalu lebih tinggi kurang lebh 2.5 cm dari pipa air keluar.
7. Septic tank harus dilengkapi dengan lubang pemeriksaan dan lubang penghawaan untuk membuang gas hasil penguraian.

6. Rencana Pengelolaan Sampah

1. Pewadahan Sampah

Melakukan pewadahan sampah dengan jenis sampah yang telah terpilah,yaitu :

- Sampah organik seperti daun sisa,sayuran,kulit buah lunak,sisa makanan dengan wadah warna gelap.
- Sampah an organik seperti gelas,plastik ,logam,dan lainnya,dengan wadah warna terang.
- Sampah bahan berbahaya diberi dengan warna merah yang berlambang khusus.

Pola pewadahan sampah dapat dibagi dalam individual dan komunal. Pewadahan dimulai dengan pemilahan baik untuk pewadahan individual maupun komunal sesuai dengan pengelompokan pengelolaan sampah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan :

1. Implementasi program KOTAKU di Kelurahan Sanua dilaksanakan dalam 4 tahap utama pembangunan yaitu, tahap persiapan dalam tahap ini sendiri dari sosialisasi sekaligus pembentukan BKM melalui pemilihan secara demokratis oleh masyarakat setempat dan musyawarah kelurahan I yang membahas hasil sosialisasi, tahap perencanaan dalam tahap ini terdiri dari musyawarah kelurahan II yang diikuti oleh kaum perempuan dan musyawarah III dengan penetapan jadwal RKM (Rencana Kerja Masyarakat) dan penyusunan anggaran dana yang akan dikeluarkan, tahap pelaksanaan dalam tahap ini terdiri dari musyawarah kelurahan IV yang membahas tentang langka-langka pelaksanaan pembangunan fisik dan pengadaan barang, kemudian pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dan tahap evaluasi didalamnya terdapat musyawarah kelurahan V yang membahas laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pembantuan KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaatan), sampai pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun. Dan dapat memberikan manfaat

bagi masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur yang telah berhasil dibangun. Tapi tidak seluruh masyarakat di daerah tersebut ikut dalam mengimplementasikan program KOTAKU, terlalu domain campur tangan pemerintah dalam segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan.

2. Bentuk keterlibatan (partisipatif) yang merujuk pada teori partisipasi di Kelurahan Sanua yang berbasis masyarakat cukup banyak antusiasnya dalam pembuatan keputusan atau mengikuti musyawarah kelurahan, memberikan usulan-usulan dalam pembangunan, dalam hal ini dapat dilihat sudah terjalannya melibatkan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan infrastruktur melalui program KOTAKU di Kelurahan Sanua. Namun masyarakat daerah tersebut tidak seluruhnya ikut terlibat dalam setiap pelaksanaan program, masih terlalu banyak campurtangan pemerintah dalam pelaksanaan program KOTAKU yang membuat pembangunan berbasis masyarakat kurang terlaksana. Dan pada umumnya telah membuat masyarakat memahami sangat pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan program yang diberikan oleh pemerintah.

B. Saran

Sebagai akhir dari uraian kiranya penulis mengajukan beberapa saran sebagai sumber pemikiran sebagai berikut:

1. Perlibatan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan harus lebih ditingkatkan dalam setiap proses pembangunan, baik mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. Masyarakat adalah orang yang paling mengetahui masalah apa yang terjadi di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dan apa yang mereka butuhkan, jadi perlibatan masyarakat serta merespon opini yang ada di seluruh elemen harus lebih diutamakan.
2. Musyawarah kelurahan merupakan suatu forum bagi masyarakat dalam merencanakan apa yang menjadi kebutuhannya dalam pembangunan infrastruktur, jadi pemerintah harus selalu memperhatikan setiap hasil musyawarah karena didalamnya terdapat seluruh aspirasi masyarakat dalam merealisasikan dalam bentuk program-program pembangunan. Pemerintah harus lebih peka dan tanggap terhadap keluhan-keluhan masyarakat. Setiap pengambilan keputusan dalam program pembanguan haruslah senantiasa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat karena hal inilah yang meningkatkan kembali keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan pembangunan *top-down* harus segera ditinggalkan dan beralih pendekatan *botton-up* lebih aspiratif dan memihak kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta 2001)

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memerdayakan Masyarakat* (Bandung: PT RefikaAditia,2010)

Adi, Isbandi Rukminto. *Pemerdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*(Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014)

Bintoro Tjokromidjojo, *Perencanaan Pembangunan* (jakarta: Gunung Agung, 1980)

Isbandi Rukminto, Adi, *Interfensi Komunitas, Pengembangan Pemerdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Raldi Hendron, Koestoer Prespektif Lingkungan Desa-Kota (Universitas Indonesia, 2007)

Adi.I.R, *Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemerdayaan Masyarakat* (Jakarta: rjawali Pers, 2008)

Sjafari, Agus. &Sumaryo GS (ed), *Pembangunan Masyarakat: Konsep dan Implementasi di Era Otonomi Daerah*. (Semarang: FISIPUntirta Press, 2012)

Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan masyarakat, cet. Ke-4* (Yogyakarta: PustakaBelajar, 2013)

Zubaedi, *Wawancara Pembangunan Alternatif* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2007)

Sumber Internet

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/193/173>

Sumber Dokumen

Pedoman umum, *KOTAKU (Kota Tapa Kumuh)*, (Direktur Jendral Cipta Karya 2015)

Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Sanua Tahun Thn 2016

Badan Pusat Statistik (BPS), *Kecamatan Kendari Barat Dalam Angka Tahun 2017*

Badan Pusat Statistik (BPS), *Kota Kendari Dalam Angka Tahun 2017*



BIODATA PENULIS



Arit Indrajab, Lahir di Kecamatan Lipu Kabupaten Buton Utara, 21 Maret 1995. Menyelesaikan Pendidikan sekolah Dasar di SD Negeri 2 Asinua di Kabupaten Konawe. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMP 1 Kulisusu di Kabupaten Buton Utara. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Kulisusu di Kabupaten Buton Utara lulus tahun 2013. Pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Konawe (IPPMIK) Makassar periode 2015-2016. Dan Ketua Dewan Pembina Organisasi Himpunan Pemuda Mahasiswa Buton Utara (HIPMA BUTUR) Makassar 2018 – 2019, Pernah Menjabat Sebagai Kordinator Pengkaderan Di Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah Dan Kota (HMPWK) Pernah Mengikuti Latihan Kader I LKI Himpunan Mahasiswa Islam (Hml) cabang Makassar Pernah Menjadi Anggota Pengurus Ikatan Mahasiswa Perencana Indonesia (IMPI) sekarang Menjabat Sebagai anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buton Utara.

